



**PEMERINTAH  
KABUPATEN  
PONOROGO**

# Renstra

## **RENCANA STRATEGIS 2025-2029**



**DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO  
KABUPATEN PONOROGO**

**Jl. Aloon-Aloon Utara No. 9 Lt. VII, Ponorogo, 63413  
Telp. (0352) 3514086**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya maka Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan. Substansi Renstra adalah penjabaran Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan serta Program Prioritas Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Penyusunan Renstra Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo Tahun 2025-2029.

Dokumen Renstra Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo Tahun 2025-2029 merupakan pedoman dalam pembuatan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo dalam merencanakan program dan kegiatan setiap tahunnya yang menyentuh kebutuhan masyarakat serta memenuhi harapan warga Kabupaten Ponorogo.

Harapan kami adalah pembangunan bidang industri, perdagangan dan koperasi dan Usaha Mikro menjadi tanggungjawab bersama seluruh komponen masyarakat Kabupaten Ponorogo dan mengajak semua pemangku kepentingan secara bersama-sama berbuat untuk membenahi dan menyejahterakan warga Kabupaten Ponorogo secara lahir dan batin. Dengan bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja tuntas, dan bekerja ikhlas Insya Allah kita dapat wujudkan cita-cita dan realisasikan visi – misi.

Ponorogo, 19 September 2025

Kepala Dinas  
Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro  
Kabupaten Ponorogo



**RINGGA DWI HERI IRAWAN, S.STP., M.Si.**

Pembina Utama Muda

NIP. 197512091996031001



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	7
1.1 Latar Belakang.....	7
1.2 Dasar Hukum Penyusunan .....	8
1.3 Maksud dan Tujuan .....	11
1.4 Sistematika Penulisan .....	12
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS ....	15
PERANGKAT DAERAH.....	15
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah .....	15
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .....	15
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah .....	25
2.1.2 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	30
2.1.3 Kelompok Sasaran Layanan .....	37
2.2 Permasalahan dan Isu Perangkat Daerah .....	38
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.....	39
2.2.2 Isu strategis .....	41
BAB III	
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....	46
3.1 Tujuan.....	46
3.2 Sasaran .....	46
3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 .....	51
3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 .....	52
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	55
4.1 Uraian Program.....	55
4.2 Uraian Kegiatan .....	63
4.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	92



4.4	Indikator Kinerja Kunci (IKK).....	93
BAB V PENUTUP .....		96
5.1	Kesimpulan .....	96
5.2	Saran .....	97

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Ponorogo .....24



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan .....	25
Tabel 2.2 Jumlah ASN Berdasarkan Pangkat/Golongan .....	25
Tabel 2.3 Jumlah ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	26
Tabel 2.4 Jumlah Tenaga Kontrak Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	26
Tabel 2.5 Jumlah ASN Berdasarkan Bidang/Unit Kerja.....	26
Tabel 2.6 Jumlah ASN Berdasarkan Jenis Kelamin.....	27
Tabel 2.7 Daftar Inventaris Dinas .....	28
Tabel 2.8 Daftar Alamat Gedung/Kantor .....	29
Tabel 2.9 Pencapaian Kinerja Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Ponorogo Tahun 2021-2025.....	33
Tabel 2.10 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kab . Ponorogo Tahun 2021-2025 .....	36
Tabel 2.11 Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	39
Tabel 2.12 Rumusan Isu Strategis Urusan Koperasi dan Usaha Mikro.....	42
Tabel 2.13 Rumusan Isu Strategis Urusan Perdagangan.....	43
Tabel 2.14 Rumusan Isu Strategis Urusan Perindustrian.....	45
Tabel 3.1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran .....	49
Tabel 3.2 Tahapan Renstra Perangkat Daerah .....	51
Tabel 3.3 Rumusan Arah kebijakan Renstra Perangkat Daerah.....	53
Tabel 4.1 Program Perangkat Daerah.....	60
Tabel 4.2 Rumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah.....	63
Tabel 4.3 Rencana Program / Kegiatan / Sub Kegiatan dan Pendanaan.....	74
Tabel 4.4 Daftar Sub kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah .....	87
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagkum Tahun 2025-2029.....	92
Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci Dinas Perdagkum Tahun 2025-2029.....	93

Tabel 4.7 Definisi Operasional Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perdagkum Tahun 2025-2029 .....	94
---	----

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, lebih mengutamakan pelaksanaan desentralisasi yang memberikan keleluasaan dan sebagian besar kewenangan kepada daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Keleluasaan tersebut adalah dalam hal kewenangan untuk menentukan dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal itu setiap daerah harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) SKPD.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan

kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Keterkaitan Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo dengan RPJMD Kabupaten Ponorogo sebagai upaya menjamin keselarasan dan sinergitas program pembangunan daerah yang telah tertuang dalam RPJMD Kabupaten Ponorogo yang ditetapkan oleh Kepala Daerah khususnya di sektor perdagangan, koperasi dan usaha mikro serta perindustrian. Berdasarkan RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2025-2029, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo mendukung pencapaian misi ke-2 (dua), yaitu “Transformasi Ekonomi Dalam Rangka Penguatan UMKM, Koperasi, BUMD dan BUMDes Melalui Riset Inovasi, Implementasi Ekonomi Hijau, Transformasi Digital, Integrasi Ekonomi Wilayah, Serta Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja”, melalui Program Kerja Unggulan “UMKM Hebat”. Beberapa rencana implementasi kegiatan guna mendukung program tersebut antara lain melalui kegiatan revitalisasi sarana dan prasarana perdagangan, pengolahan dan pemanfaatan sampah di pasar, pengembangan kawasan industri Sentra Industri Hasil Tembakau (SIHT), peningkatan kualitas SDM pelaku usaha, fasilitasi legalitas usaha, pameran produk unggulan, serta penguatan ekonomi dengan menggandeng UMKM.

## 1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar Hukum Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo Tahun 2025–2029 disusun atas dasar :

- a. Landasan Hukum : Pancasila
- b. Landasan Konstitusional : Undang-Undang Dasar 1945
- c. Landasan Operasional :
  1. Tap MPR RI Nomor VII/MPR/2003 tentang Visi Indonesia Masa Depan;
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur (Himpunan

- Peraturan Negara Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  5. Undang-undang (UU) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 194 tahun 2024, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987)
  6. Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
  7. Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)
  8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun

- 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402).
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
  12. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2012 Nomor 2);
  14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ponorogo tahun 2012-2032;
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 08 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2025-2029
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 02 Tahun

- 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2025-2029;
17. Keputusan Bupati Ponorogo Nomor 157 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo Tahun 2025–2029 sebagai salah satu bentuk penjabaran RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2025–2029 sekaligus sebagai dokumen perencanaan pembangunan bidang koperasi dan Usaha Mikro, bidang perindustrian dan bidang perdagangan yang mengakomodasi berbagai aspirasi yang ada, memfokuskan pada hasil identifikasi dan penanganan isu-isu strategis, yang berorientasi pada tindakan antisipatif.

Adapun maksud penyusunan Renstra Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo Tahun 2025-2029 adalah :

1. Menjabarkan Visi dan Misi Kabupaten Ponorogo ke dalam rencana strategis kinerja Perangkat Daerah.
2. Untuk menyelaraskan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan seluruh program dan kegiatan SKPD agar sesuai dan mendukung program nasional, program provinsi dan utamanya visi dan misi kepala daerah Kabupaten Ponorogo pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun ke depan;
3. Penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan; dan
4. Terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar pelaku pembangunan dan pemangku kepentingan dalam pembangunan koperasi dan usaha mikro, perindustrian dan perdagangan di Kabupaten Ponorogo.

Sedang tujuan penyusunan Renstra Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo Tahun 2025-2029 adalah :

1. Untuk menjabarkan visi, misi, dan program Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo kedalam berbagai kegiatan, dan dijadikan acuan untuk direalisasikan pada masing-masing tahun anggaran;
2. Tersedianya dokumen perencanaan Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo untuk periode 5 (lima) tahun ke depan sebagai pedoman dalam menetapkan arah kebijakan pembangunan koperasi dan usaha mikro, perindustrian dan perdagangan, penyusunan program dan kegiatan pembangunan koperasi dan usaha mikro, perindustrian dan perdagangan dalam dokumen Renja Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo pada setiap tahunnya;
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan target kinerja yang dituangkan dalam perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja yang selanjutnya dievaluasi dan di jabarkan dalam Laporan Kinerja (LKj) pada tiap-tiap tahun anggaran sebagai perwujudan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
4. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD berjalan.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo Tahun 2025–2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN, berisi :

1.1. Latar belakang

1.2. Dasar hukum penyusunan

- 1.3. Maksud dan tujuan
- 1.4. Sistematika penulisan.

## BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH, berisi :

### A. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

- 2.1.a Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah,
- 2.1.b Sumber Daya Perangkat Daerah,
- 2.1.c Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (Capaian SPM),
- 2.1.d Kelompok sasaran layanan (misalnya Bappeda, kelompok sasaran layanan adalah Perangkat Daerah)

### B. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

- 2.2.a Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.2.b Isu Strategis

## BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN berisi :

- 3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
- 3.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
- 3.3. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
- 3.4. Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

## BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN, berisi;

- 4.1 Uraian Program
- 4.2 Uraian Kegiatan

- 4.3 Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif
- 4.4 Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah
- 4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah; dan
- 4.6 Target Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

## BAB V. PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan urusan pemerintahan daerah.

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

#### PERANGKAT DAERAH

##### 2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah dijabarkan dalam tugas, fungsi dan struktur organisasi perangkat daerah berdasarkan keputusan Bupati Ponorogo.

##### 2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Keputusan Bupati Ponorogo Nomor 157 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo, bahwa Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang koperasi dan usaha mikro, bidang perindustrian dan bidang perdagangan.

Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan urusan perdagangan, koperasi dan usaha mikro, perindustrian serta pengelolaan pasar;
2. Pelaksanaan kebijakan urusan perdagangan, koperasi dan usaha mikro, perindustrian serta pengelolaan pasar;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan perdagangan, koperasi dan usaha mikro, perindustrian serta pengelolaan pasar;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang perdagangan, koperasi dan usaha mikro, perindustrian serta pengelolaan pasar; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan serta memberikan



pembinaan administrasi di bidang perdagangan, koperasi dan usaha mikro, perindustrian serta pengelolaan pasar.

Adapun tugas dan fungsi sekretariat, bidang serta unit pelaksana teknis memiliki tugas yang ada di Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut :

### **1. Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan Kepegawaian kepada semua unsur di lingkungan Dinas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas Dinas secara terpadu dan tugas pelayanan administratif;
- b. pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
- c. penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan sistem pengendalian internal;
- d. pengelolaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
- e. pengelolaan surat menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan dan kepustakaan Dinas;
- f. pengelolaan asset, rumah tangga dan perlengkapan Dinas;
- g. penyelenggaraan protokoler, humas dan perjalanan Dinas;
- h. penghimpunan dan penyusunan data informasi, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan Dinas;
- i. pengumpulan bahan dan pelaksanaan peningkatan kinerja organisasi Dinas; dan
- j. Pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretariat, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional



Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pembinaan administrasi umum, rumah tangga dan kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud diatas, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. melakukan pengelolaan, pembinaan administrasi umum, kearsipan dan ketatalaksanaan di lingkungan Dinas;
- b. melakukan urusan rumah tangga dan keamanan Dinas;
- c. melakukan penyusunan rencana dan pengadaan sarana prasarana kebutuhan Dinas;
- d. melakukan penyusunan rencana, pengelolaan dan perawatan perlengkapan Dinas;
- e. menyelenggarakan inventarisasi kekayaan/asset dilingkungan Dinas;
- f. penyelenggaraan protokoler, humas dan perjalanan Dinas;
- g. pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian di lingkungan Dinas ; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Sekretaris Dinas.

## **2. Bidang Industri**

Bidang Industri mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang industri, meliputi industri hasil pertanian dan kehutanan, kimia dan bahan bangunan, logam, mesin, elektronika dan aneka industri serta bina lingkungan industri.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Bidang Industri menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan program pembinaan, pengembangan dan pembangunan industri ;
- b. Pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengembangan dan penumbuhan industri hasil pertanian dan kehutanan, industri

- kehutanan, kimia dan bahan bangunan, logam, mesin, elektronika dan aneka industri serta bina lingkungan industri;
- c. Pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan teknis usaha industri, peningkatan sarana dan mutu hasil produksi;
- d. Pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha industri dan pelaksanaan perizinan di bidang industri;
- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan terhadap pelaksanaan tugas pokok di bidang industri; dan
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

### **3. Bidang Perdagangan**

Bidang Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang perdagangan meliputi perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri dan perlindungan konsumen.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Perdagangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan analisa data perdagangan;
- b. Pelaksanaan kegiatan perdagangan dalam negeri dan luar negeri;
- c. Pelaksanaan kegiatan pembinaan, promosi, kemitraan dan pengembangan usaha sarana perdagangan
- d. Pemberian informasi pada perusahaan tentang wajib daftar perusahaan;
- e. Pelaksanaan fasilitas penerbitan, perizinan dan pendaftaran perusahaan;
- f. Pengawasan, pemantauan, penyediaan dan penyaluran barang dan jasa;
- g. Melaksanakan koordinasi, pengendalian, pengawasan, sinkronasi ketersediaan dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- h. Pelaksana program peningkatan sarana distribusi perdagangan;



- i. Pemberian petunjuk teknis sarana perdagangan pengembangan ekspor, promosi, kemitraan, dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- j. Pelaksanaan pembinaan evaluasi pelaporan tugas di bidang perdagangan; dan
- k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas.

#### **4. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro**

Bidang Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, membuat pedoman teknis pelaksanaan dan pemberdayaan di bidang koperasi dan usaha mikro.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Bidang Koperasi dan Usaha Mikro menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusun perencanaan pengembangan koperasi dan kelompok-kelompok pra koperasi, dan lembaga keuangan mikro;
- b. Penyusunan pedoman teknis tentang kelembagaan, usaha koperasi dan usaha mikro serta lembaga keuangan mikro;
- c. Pelaksanaan pengembangan koperasi, kelembagaan, usaha koperasi, lembaga keuangan mikro, kelompok pra koperasi dan memberikan fasilitas pembiayaan;
- d. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan koperasi, lembaga keuangan mikro, serta fasilitasi pembiayaan;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang koperasi dan usaha mikro ; dan
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas.

#### **5. Bidang Pengelolaan Pasar**

Bidang Pengelolaan Pasar mempunyai tugas mengumpulkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengelolaan pasar.



Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud diatas, Bidang Pengelolaan Pasar menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengumpulan bahan dalam rangka perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pasar;
- b. Pelaksanaan pelayanan perijinan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan pasar;
- c. Pelaksanaan pembinaan di bidang pengelolaan pasar;
- d. Pelaksanaan pemeliharaan dan kebersihan pasar;
- e. Pelaksanaan ketertiban dan keamanan pasar; dan
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

## **6. Kelompok Jabatan Fungsional**

- a. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari beberapa jabatan fungsional dan terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

## **7. Unit Pelaksana Teknis Dinas**

Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo. Yang terdiri dari :

- a. UPTD Sentra Industri
- b. UPTD Metrologi Legal
- c. UPT Pasar Legi Ponorogo , dengan wilayah kerja meliputi kecamatan ponorogo, kecamatan siman dan kecamatan babadan ;
- d. UPT Pasar Pulung, dengan wilayah kerja meliputi kecamatan pulung dan kecamatan jenangan;
- e. UPT Pasar Jetis, dengan wilayah kerja meliputi kecamatan jetis, kecamatan sambit dan kecamatan sawoo;

- f. UPT Pasar Balong, dengan wilayah kerja meliputi kecamatan balong, kecamatan selahung dan kecamatan bungkal; dan
- g. UPT Pasar Somoroto, dengan wilayah kerja meliputi kecamatan kauman dan kecamatan badegan.

UPTD Sentra Industri mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pelayanan teknis, pembinaan, alih teknologi, pengembangan desain, penyediaan sarana usaha industry, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, UPTD Sentra Industri menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja kegiatan UPTD;
- b. Pelaksanaan tugas ketatusahaan UPTD;
- c. Pelayanan teknis, pembinaan kawasan dan pengembangan IKM;
- d. Fasilitasi promosi di Sentra Industri;
- e. Pelaksanaan operasional UPTD;
- f. Pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan pengawasan sentra industri; dan
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

UPTD Sentra Industri, terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan operasional sentra industri serta melaksanakan pembinaan administrasi pelaksanaan tugas-tugas UPTD.

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang bersifat struktural dan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perencanaan, pelaporan administrasi umum, administrasi



keuangan, administrasi kepegawaian dan tata laksana rumah tangga UPTD.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan dan penyelenggaraan program UPTD;
- b. Pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
- c. Pengelolaan surat menyurat, kearsipan dan ketatalaksanaan;
- d. Pengelolaan rumah tangga, sarana dan prasarana;
- e. Penyusunan data dan pelaporan; dan
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala UPTD.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sebagian tugas UPTD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

UPTD Metrologi Legal mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang metrologi legal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, UPTD menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengelolaan dan pemeliharaan Cap Tanda Tera;
- b. Pelaksanaan administrasi ketatausahaan;
- c. Pelaksanaan pengawasan Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) metrology legal;
- d. Pelaksanaan tera dan tera ulang UTTP;
- e. Pelaksanaan evaluasi kinerja dan penyusunan laporan kegiatan; dan
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

UPTD Metrologi Legal, terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan serta

melaksanakan pembinaan administrasi pelaksanaan tugas-tugas UPTD.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sebagian tugas UPTD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

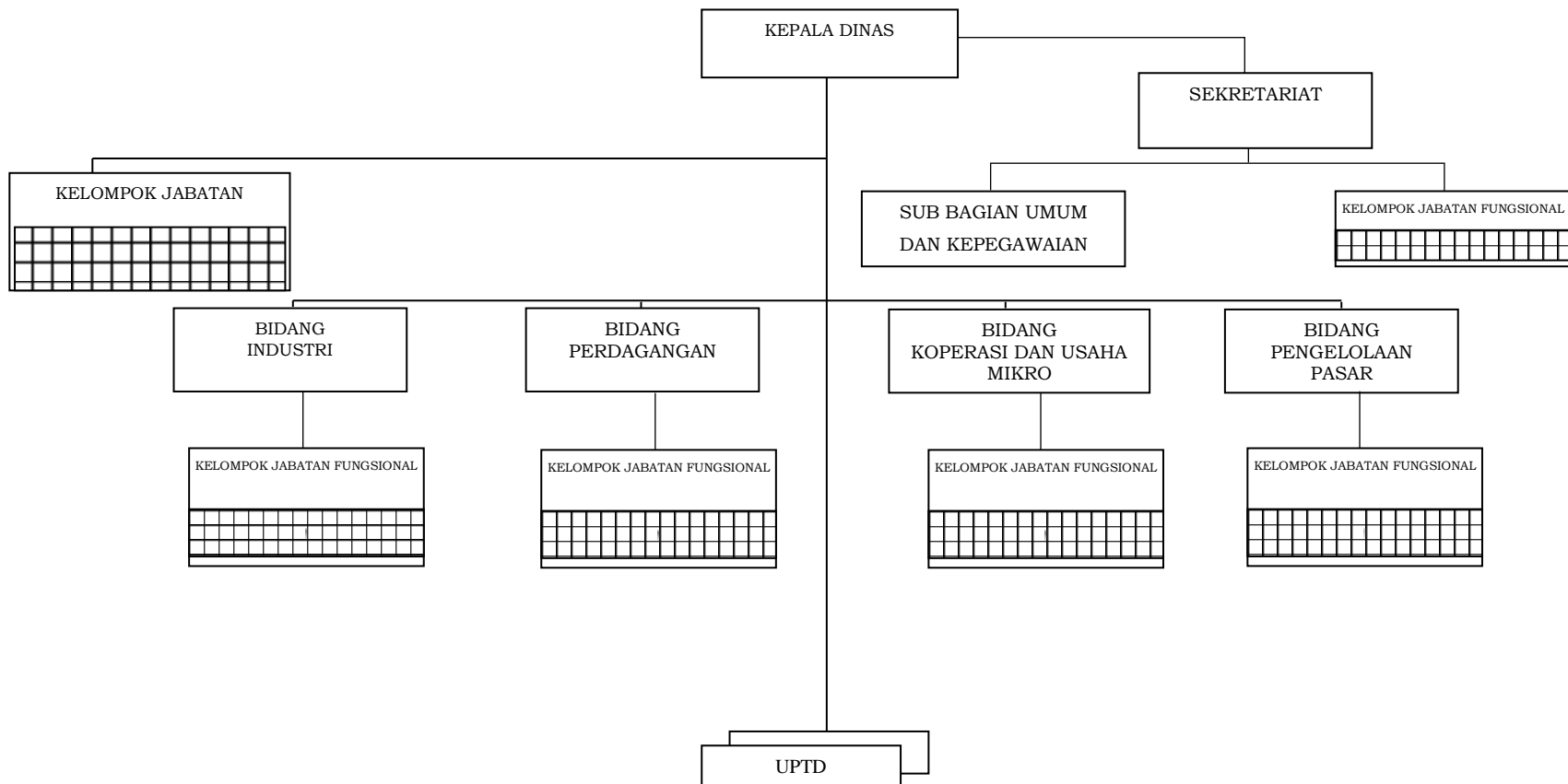
UPT pasar merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dinas di lapangan di bidang pengelolaan pasar. UPT pasar dipimpin oleh kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas melalui sekretaris dinas. UPT pasar mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional pengelolaan pasar di kecamatan sesuai dengan kedudukan dan / atau wilayah kerjanya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, UPT pasar menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan operasional pasar;
- b. Pelaksanaan pemungutan retribusi pasar;
- c. Pelaksanaan pengelolaan dan perawatan sarana dan prasarana pasar;
- d. Pelaksanaan kebersihan, pertamanan dan kerapian pasar;
- e. Pelaksanaan ketertiban dan keamanan pasar; dan
- f. Pelaksanaan tuga-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Ponorogo

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO (TIPE A)**



## 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

### 1. Sumber Daya Manusia

Pengelolaan SDM aparatur bertujuan untuk meningkatkan sistem pengelolaan dan kapasitas sumber daya manusia aparatur sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan dengan prinsip transparansi akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, menjunjung tinggi supremasi hukum dalam upaya mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Untuk mengemban tugas pokok dan fungsi sebagaimana diuraikan di atas, Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo didukung personil sebanyak 122 orang, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah	Keterangan
1.	Pejabat Struktural (ASN)	9	Orang
2.	Pejabat Fungsional (ASN)	20	Orang
3.	Staf/Fungsional umum (ASN)	43	Orang
4.	Tenaga Kontrak (Non ASN)	50	Orang
Total		122	Orang

Tabel 2.2 Jumlah ASN Berdasarkan Pangkat/Golongan

No	Pangkat	Golongan	Jumlah	Ket.
Pegawai Negeri Sipil (PNS)				
1.	Pengatur Muda Tingkat I	II / b		Orang
2.	Pengatur	II / c		Orang
3.	Pengatur Tingkat I	II / d		Orang
4.	Penata Muda	III / a		Orang
5.	Penata Muda Tingkat I	III / b		Orang
6.	Penata	III / c		Orang
7.	Penata Tingkat I	III / d		Orang
8.	Pembina	IV / a		Orang
9.	Pembina Tingkat I	IV / b		Orang
10.	Pembina Utama Muda	IV / c		Orang
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)				

11.	Terampil	VII	2	Orang
Total			72	Orang

Rincian latar belakang dan tingkat pendidikan SDM Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.3 Jumlah ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1.	Strata 2	11	Orang
2.	Strata 1/D4	38	Orang
3.	Diploma	4	Orang
4.	SMA	13	Orang
5.	SMP	5	Orang
6.	SD	1	Orang
Total		72	Orang

Tabel 2.4 Jumlah Tenaga Kontrak Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1.	Strata 1/D4	6	Orang
2.	Diploma	0	Orang
3.	SMA	32	Orang
4.	SMP	5	Orang
5.	SD	7	Orang
Total		50	Orang

Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo yang terdiri dari 5 (lima) bidang dan 2 (lima) UPTD, maka secara otomatis dari 72 orang ASN terdistribusi ke bidang dan UPTD. Adapun komposisi pembagian SDM sebagai berikut :

Tabel 2.5 Jumlah ASN Berdasarkan Bidang/Unit Kerja

No.	Bidang/Unit Kerja	Jumlah	Keterangan
-----	-------------------	--------	------------

1	Sekretariat	7	Orang
2	Bidang Perdagangan	9	Orang
3	Bidang Industri	7	Orang
4	Bidang Koperasi dan UM	9	Orang
5	Bidang Pengelolaan Pasar	9	Orang
6	UPTD Sentra Industri	5	Orang
7	UPTD Metrologi Legal	6	Orang
8	UPT Pasar Legi	6	Orang
9	UPT Pasar Balong	3	Orang
10	UPT Pasar Jetis	4	Orang
11	UPT Pasar Sumoroto	2	Orang
12	UPT Pasar Pulung	5	Orang
Total		72	Orang

Tabel 2.6 Jumlah ASN Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Keterangan
1.	Laki-Laki	49	Orang
2.	Perempuan	23	Orang
Total		72	Orang

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kuantitas Sumber Daya Manusia di Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo masih kurang dan perlu diadakan penambahan karena banyaknya kegiatan yang harus dilaksanakan. Dengan adanya penambahan dimungkinkan dapat memaksimalkan terlaksananya kegiatan sehingga akan dengan mudah untuk mencapai target kinerja dan visi misi Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo khususnya dan Pemerintah Kabupaten Ponorogo pada umumnya.

#### **g. Sarana dan Prasarana**

Sebagai penunjang operasional kelembagaan, Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo ditunjang dengan

sarana dan prasarana berupa bangunan gedung, alat transportasi, peralatan dan perlengkapan kantor lainnya. Adapun inventaris dinas sampai dengan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7 Daftar Inventaris Dinas

No.	Sarana dan Pra Sarana	Jumlah	Satuan
1	Bangunan gedung	32	unit
2	Kendaraan dinas roda 4 (mobil)	6	unit
3	Kendaraan dinas roda 2 (sepeda motor)	37	unit
4	Mesin ketik manual	7	buah
5	Komputer PC	15	unit
6	Lap Top / Note Book	31	unit
7	Printer	28	unit
8	LCD + layar	7	unit
9	Brankas	1	unit
10	Lemari Besi/Metal	9	unit
11	Lemari kayu	8	buah
12	Lemari kaca	4	buah
13	Filling besi/metal	11	buah
14	Meja Rapat	2	buah
15	Meja tulis	20	buah
16	Kursi tamu	6	set
17	Kursi rapat	50	buah
18	Kursi putar	8	buah
19	Kursi besi/metal	8	buah
20	AC Split	8	buah
21	Wireless	1	unit
22	Handy cam	15	unit
23	Camera digital + attachment	11	unit
24	Televisi	5	unit
25	Lemari Es	7	unit

Sarana dan prasarana yang ada pada Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo sudah mencukupi untuk

pelaksanaan program dan kegiatan. Namun untuk barang modal yang sudah ada perlu adanya pemeliharaan dan jika ada kerusakan yang dimungkinkan tidak dapat diperbaiki perlu adanya penggantian atau pembelian baru.

Selain itu Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo dalam pelayanannya menempati beberapa gedung kantor secara terpisah-pisah, adapun alamat masing-masing kantor dapat dilihat pada Tabel 2.8.

Tabel 2.8 Daftar Alamat Gedung/Kantor

No.	Nama Aset	Alamat
1.	Gedung Pusat Dinas Perdagkum (Sekretariat, Bidang Perdagangan, Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Bidang Pengelolaan Pasar)	Jl. Aloon-Aloon Utara No. 9 Gedung Graha Krida Praja Lantai 7, Kab. Ponorogo
2.	UPTD Sentra Industri	Jl. Trunojoyo, Tambakbayan, Ponorogo
3.	UPTD Metrologi Legal	Jl. Anoman No. 22, Krajan, Pakunden, Ponorogo
4.	Gedung Bidang Industri	Jl. Pahlawan, Bangunsari, Ponorogo

### 3. Sumber Daya Lainnya

Sumber daya lain yang dimiliki Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo adalah 28 Pasar Daerah yang letaknya menyebar di Kabupaten Ponorogo. Pasar daerah mempunyai andil besar dalam hal Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo dalam bidang pengelolaan pasar. Dari 28 pasar daerah tersebut dibagi menjadi 5 UPT Pasar Daerah yang masing-masing dipimpin oleh kepala UPT Pasar Daerah. Setiap UPT Pasar Daerah memiliki tanggungjawab 3 sampai 4 pasar daerah sebagai berikut :

1. UPT Pasar Somoroto meliputi Pasar Somoroto I, Somoroto II dan Badegan;

2. UPT Pasar Pulung meliputi Pasar Pulung, Jenangan dan Kesugihan;
3. UPT Pasar Kota meliputi Pasar Songgolangit, Legi Selatan dan Tonatan;
4. UPT Pasar Jetis meliputi Pasar Jetis Umum, Jetis Hewan, Tamansari dan Sawoo; dan
5. UPT Pasar Balong meliputi Pasar Balong, Ngumpul, Bungkal dan Slahung.

### **2.1.2 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo adalah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Ponorogo untuk melaksanakan urusan pemerintah kabupaten dalam perumusan kebijakan teknis di bidang industri, perdagangan, koperasi dan usaha mikro.

Untuk mendukung tercapainya pelayanan yang optimal maka ditempuh dengan beberapa program. Program yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran penyelenggaraan bidang industri, bidang perdagangan dan bidang koperasi dan usaha mikro dalam 5 tahun terakhir (2025-2029) adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program pelayanan izin usaha simpan pinjam;
3. Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi;
4. Program penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi;
5. Program pendidikan dan latihan perkoperasian;
6. Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi;
7. Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (UMKM);
8. Program pengembangan UMKM;
9. Program penguatan badan hukum koperasi;
10. Program perizinan dan dan pendaftaran perusahaan;
11. Program peningkatan sarana distribusi perdagangan;



12. Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting
13. Program pengembangan ekspor;
14. Program standarisasi dan perlindungan konsumen;
15. Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri;
16. Program perencanaan dan pembangunan industri;
17. Program pengendalian izin usaha industri;
18. Program pengelolaan sistem informasi industri nasional;

Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro kabupaten Ponorogo diukur dari tingkat pencapaian kinerja berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya, kinerja ini menurut indikator kinerja urusan wajib dan/atau indikator kinerja pelayanan Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo. Capaian kinerja melalui pelaksanaan renstra periode Tahun 2025-2029 diperoleh realisasi sebagaimana tabel berikut :

**TABEL 2.9 (T-C.23)**  
**Pencapaian Kinerja Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro**  
**Kabupaten Ponorogo**  
**Tahun 2021 - 2026**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Taget NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Prosentase koperasi aktif				1,50 %	87,5 0%	88,0 0%	85,0 0%	-	86,1 4%	86,6 5%	81,1 8%	81,5 4%	-	281,3 3%	99,03 %	92,25 %	95,92 %	-
2	Prosentase Peningkatan Volume usaha Koperasi				-	14,0 0%	20,0 0%	20,0 0%	-	12,2 6%	18,6 8%	24,5 0%	23,5 0%	-	-	133,3 4%	122,5 0%	70%	-
3	Prosentase Peningkatan Omset Usaha Mikro				-	2,00 %	2,00 %	1,50 %	-	1,71 %	1,78 %	1,93 %	3%	-	-	89,00 %	96,50 %	200%	-
4	Prosentase koperasi yang mengalami				-	-	-	-	70,0 0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	peningkatan SHU																		
5	Prosentase usaha mikro yang meningkat menjadi usaha kecil dan menengah				-	-	-	-	10,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Prosentase peningkatan nilai perdagangan				-	2,50%	2,50%	2,20%	2,50%	2,13%	2,52%	2,32%	2,40%	-	-	100,80%	92,80%	109,09%	-
7	Prosentase Pertumbuhan IKM				-	-	-	-	0,25%	-	0,20%	0,24%	0,27%	-	-	-	-	106,80%	-

Tabel 2.9 Pencapaian Kinerja Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Ponorogo Tahun 2021-2025

Indikator kinerja pertama yang tercapai adalah prosentase koperasi yang mengalami peningkatan SHU. Adapun faktor yang mempengaruhi keberhasilan capaian pada indikator ini adalah :

1. Meningkatnya jumlah koperasi aktif di Kabupaten Ponorogo menyebabkan meningkat pula tingkat perputaran uang dalam usaha koperasi;

2. Tingginya minat masyarakat untuk menjadi anggota koperasi dengan memanfaatkan kemudahan fasilitas pinjaman sehingga volume usaha koperasi meningkat.
3. Pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengawasan, dan pendampingan terhadap tata kelola koperasi.



Indikator kinerja kedua yang tercapai adalah prosentase usaha mikro yang meningkat menjadi usaha kecil dan menengah. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan antara lain:

1. Program Bantuan Permodalan dan relaksasi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dapat dimanfaatkan pelaku usaha mikro untuk pengembangan usaha;
2. Metode pemasaran usaha melalui digital marketing memudahkan pelaku usaha dalam memperoleh pembeli sehingga akan meningkatkan omset usaha;
3. Pendidikan dan pelatihan usaha meningkatkan skill dalam meningkatkan kualitas produk dan manajemen usaha serta;
4. Semakin mudahnya pelaku usaha dalam pengurusan perijinan berusaha melalui aplikasi berbasis online.

Indikator kinerja ketiga yang tercapai adalah prosentase peningkatan nilai perdagangan. Adapun hal-hal yang mempengaruhi keberhasilan capaian kinerja antara lain permintaan ekspor akan pupuk di Ponorogo berkurang, sedangkan ekspor rempah mengalami peningkatan.

Indikator kinerja keempat yang tercapai adalah prosentase pertumbuhan IKM. Adapun faktor yang keberhasilan antara lain:

1. Tingginya minat masyarakat, khususnya untuk mendirikan usaha Industri Kecil Menengah.
2. Adanya fasilitasi/pelatihan dalam rangka peningkatan usaha IKM melalui pelatihan-pelatihan bagi IKM.
3. Peningkatan omset IKM melalui promosi produk-produk unggulan IKM di pameran.

Indikator kinerja yang tidak tercapai adalah prosentase peningkatan omset Usaha Mikro. Faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya indikator kinerja tersebut antara lain terbatasnya pegawai yang mempunyai keahlian sebagai penilai kesehatan koperasi.

**TABEL 2.10 (T-C.24)**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2025**

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro	Rp 33.566.802.509	Rp 17.887.064.770	Rp 17.270.488.733	Rp 15.180.827.000	Rp 16.047.664.884	Rp 15.903.572.125	Rp 16.932.025.855	Rp 16.726.714.623	Rp 14.624.197.662	Rp 7.225.260.009 (Realisasi s/d TW II)	47,38%	99,16%	90,85%	94,17%	75,23%	91,57%	17,68%

Tabel 2.10 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kab . Ponorogo Tahun 2021-2025

### 2.1.3 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah dalam bidang perdagangan, koperasi dan usaha mikro, serta perindustrian. Kelompok sasaran layanan dalam Renstra ini mencakup berbagai pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam sektor perdagangan, koperasi dan usaha mikro, serta perindustrian. Berikut adalah ringkasan kelompok sasaran layanan yang umum ditemukan dalam Renstra Dinas Perdagangan

Kelompok sasaran ini menjadi fokus dalam penyusunan program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, kualitas pelayanan, dan daya saing sektor perdagangan, , koperasi dan usaha mikro, serta perindustrian di Kabupaten Ponorogo. Setiap kelompok sasaran memiliki indikator kinerja yang spesifik untuk mengukur pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro yang mencakup dalam 3 (Tiga) urusan, sebagai berikut:

#### 1. Urusan Koperasi dan Usaha Mikro

- a. Meningkatkan penguatan kelembagaan pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro;
- b. Meningkatkan produktivitas dan daya saing Koperasi dan Usaha Mikro;
- c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM tenaga perkoperasian dan UMKM yang kompeten;
- d. Meningkatkan manajemen usaha berbasis kewirausahaan dan jejaring bisnis;
- e. Peningkatan koordinasi antar OPD untuk memperkuat integrasi perencanaan pembangunan bidang koperasi dan usaha mikro;
- f. Meningkatkan fasilitasi bagi peningkatan akses permodalan bagi koperasi dan usaha mikro; dan
- g. Meningkatkan Database UMKM secara update dan detail

#### 2. Urusan Perdagangan



- a. Penataan Pedagang Kaki Lima yang ada di jalan protokol dan aloon-aloon Ponorogo;
- b. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dan produk-produk unggulan daerah;
- c. Meningkatkan pengetahuan pelaku usaha akan prosedur ekspor dan import;
- d. Meningkatkan jaringan pemasaran dan promosi produk IKM dan UKM dan kerjasama dengan pihak lain;
- e. Meningkatkan kesadaran pelaku usaha tentang pentingnya alat ukur yang memenuhi standart dikarenakan masih rendahnya kesadaran pelaku usaha untuk menera dan tera ulang alat UTTP yang dimiliki;
- f. Meningkatkan kesadaran pengusaha IHT dalam membayar pajak/ bea/cukai/ dikarenakan masih banyaknya produk IHT yang tidak dilekati cukai;
- g. Mengoptimalkan fungsi dan peranan pasar dalam meningkatkan perekonomian; dan
- h. Revitalisasi sarana dan prasarana pasar daerah di kabupaten Ponorogo;

### **3. Urusan Perindustrian**

- a. Meningkatkan ketersediaan bahan baku yang cukup untuk mendorong industri dalam negeri;
- b. Meningkatkan produktifitas dan mutu produk IKM;
- c. Meningkatkan kerjasama IKM dengan pihak ke tiga dalam pemasaran produk-produk IKM;
- d. Meningkatkan legalitas usaha bagi IKM; dan
- e. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia pelaku usaha IKM yang telah ada dan penciptaan wirausaha baru.

## **2.2 Permasalahan dan Isu Perangkat Daerah**

Permasalahan dan isu strategis terkait tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo perlu diidentifikasi untuk mengantisipasi dinamika permasalahan dimasa yang

akan datang dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan ditahun sebelumnya serta tantangan pembangunan dimasa yang akan datang.

### 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Beberapa permasalahan yang saat ini dihadapi dalam mewujudkan pembangunan di bidang industri, perdagangan, koperasi dan usaha mikro sebagai berikut :

1. Kurangnya skill dan pengetahuan SDM pelaku usaha;
2. Kurangnya akses permodalan bagi IKM dan UKM serta rendahnya jaringan pemasaran;
3. Meningkatnya jumlah produk ilegal yang beredar di pasaran;
4. Harga bahan baku industri yang fluktuatif;
5. Banyak bermunculan minimarket dan supermarket yang menjadi pesaing baru dan ancaman pasar tradisional / pasar daerah;
6. Keberadaan PKL dan asongan yang menyebar diseluruh wilayah kota dan belum terpusat di beberapa tempat.

Secara garis besar, permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut :

Tabel 2.11 Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
Urusan Koperasi dan Usaha Mikro			
1	Belum optimalnya kualitas dan pertumbuhan koperasi dan usaha mikro	Masih rendahnya pertumbuhan koperasi dan usaha mikro yang mengalami peningkatan omset usaha dan peningkatan SHU	Belum tersedianya data dan informasi terkait pertumbuhan usaha mikro yang memadai Masih dominannya usaha mikro dan kecil menengah (UMKM) Kurangnya kebutuhan SDM yang sesuai fungsi utama tugas koperasi Kurangnya fasilitasi dalam peningkatan akses permodalan bagi koperasi



			dan usaha mikro
		Masih rendahnya koperasi yang aktif dan sehat	Masih rendahnya manajemen koperasi
<b>Urusan Perdagangan</b>			
2	Belum optimalnya pertumbuhan sektor perdagangan	Lemahnya pengetahuan pelaku usaha akan prosedur ekspor dan import	Belum optimalnya pengembangan volume ekspor impor komoditas unggulan
			Belum tersedianya data pelaku usaha di bidang ekspor impor di daerah
		Kurangnya pemasaran produk IKM dan lemahnya hubungan kerjasama dengan pihak lain	Masih lemahnya jaringan informasi pasar, produk dan promosi
		Masih rendahnya kesadaran pengusaha IHT dalam membayar pajak/bea/cukai	Masih banyak produk IHT yang tidak dilekati cukai dan atau menggunakan cukai palsu
		Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha akan pentingnya alat ukur yang memenuhi standart	Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha untuk menera dan tera ulang alat UTP yang dimiliki
		Belum optimalnya fungsi dan peranan pasar dalam meningkatkan perekonomian	Belum optimalnya penataan pasar tradisional baik dari segi fasilitas maupun lingkungan
<b>Urusan Perindustrian</b>			
3	Belum optimalnya pertumbuhan sektor industri	Rendahnya produktifitas dan mutu produk IKM	Masih dominannya industri mikro dan kecil
		Belum optimalnya penerapan standarisasi, desain produk, dan teknologi industri	Produk IKM belum memenuhi standarisasi
			Belum optimalnya pemanfaatan sentra industri di daerah
		Masih rendahnya SDM dan kurangnya IKM yang mempunyai legalitas usaha	Masih rendahnya pengetahuan dan keterampilan pelaku usaha
Belum tersedianya data IKM yang berizin maupun belum berizin			



### 2.2.2 Isu strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Adapun isu strategis pengembangan pembangunan di Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut :

1. Berkembangnya keberadaan Koperasi, IKM dan UKM di Kabupaten Ponorogo
2. Banyaknya produk-produk yang dihasilkan oleh IKM dan UKM di Kabupaten Ponorogo;
3. Motivasi yang tinggi dari pelaku usaha;
4. Sumber daya alam yang memadai untuk bahan baku produk industri tertentu;
5. Kebutuhan akan barang dan jasa semakin meningkat;
6. Lokasi pasar yang tersebar luas dan berada di kawasan strategis sehingga mudah di jangkau masyarakat;
7. Dukungan dana dari Pemerintah Provinsi/Pusat untuk pengembangan pasar tradisional.



Tabel 2.13 Rumusan Isu Strategis Urusan Perdagangan

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS yg relevan	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<p>1. Sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang Kuat seperti Industri Reog dan Kerajinan Khas Ponorogo, makanan dan Batik Ponorogo</p> <p>2. Ketersediaan Bahan Baku Lokal Produk hasil pertanian dan peternakan industri pengolahan makanan, kerajinan, dan tekstil.</p> <p>3. SDM dan Budaya</p>	<p>1. Lemahnya pengetahuan pelaku usaha akan prosedur ekspor dan import</p> <p>2. Kurangnya pemasaran produk IKM dan lemahnya hubungan kerjasama dengan pihak lain</p> <p>3. Belum optimalnya fungsi dan peranan pasar dalam meningkatkan perekonomian</p>	<p>1. Pertumbuhan UMKM dan IKM Belum Diimbangi dengan Penguatan Akses Pasar</p> <p>2. Belum Terbangunnya Sistem Distribusi dan Rantai Pasok yang Efisien</p> <p>3. Kurangnya Sarana dan Prasarana Perdagangan yang Layak</p> <p>4. Fluktuasi Harga dan Ketersediaan Bahan Pokok</p>	<p>1. Digitalisasi dan Transformasi Perdagangan Global</p> <p>2. Standarisasi dan Regulasi Perdagangan Internasional</p> <p>3. Fluktuasi Harga Komoditas dan Ketidakpastian Ekonomi Global</p> <p>4. Standarisasi dan Regulasi Perdagangan Internasional</p>	<p>1. Percepatan Transformasi Digital Nasional</p> <p>2. Penguatan Ekonomi Daerah dan UMKM sebagai Pilar Ekonomi Nasional</p> <p>3. Stabilisasi Harga dan Ketahanan Barang</p> <p>4. Ketimpangan Perdagangan Antarwilayah</p>	<p>1. Belum optimalnya pengembangan volume ekspor impor komoditas unggulan</p> <p>2. Belum tersedianya data pelaku usaha di bidang ekspor impor di daerah</p> <p>3. Belum optimalnya penataan pasar tradisional baik dari segi fasilitas maupun lingkungan</p>	<p>1. Rendahnya Daya Saing Produk Lokal di Pasar Domestik dan Regional</p> <p>2. Terbatasnya Akses Pasar bagi UMKM</p> <p>3. Kondisi Sarana dan Prasarana Perdagangan yang Belum Memadai</p> <p>4. Fluktuasi Harga dan Ketidakstabilan Pasokan Barang</p> <p>5. Kebutuhan Pokok</p>

<p>Kewirausahaan Masyarakat Ponorogo memiliki budaya wirausaha yang tinggi, terutama di sektor industri rumah tangga dan IKM.</p>						
---	--	--	--	--	--	--

Tabel 2.14 Rumusan Isu Strategis Urusan Perindustrian

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS yg relevan	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<p>1. Banyak bahan baku lokal Ponorogo memiliki potensi besar dari sektor pertanian, peternakan, dan kehutanan .</p> <p>2. Sentra IKM sudah tumbuh namun belum berskala besar.</p> <p>3. Tersedia SDM vokasi industri .</p> <p>4. Warisan budaya Reyog dan batik khas</p>	<p>1. Bahan baku belum diolah menjadi produk bernilai tambah</p> <p>2. Kurangnya promosi dan branding produk unggulan daerah</p> <p>3. Tingginya ketergantungan pada pasar lokal.</p> <p>4. Ketergantungan pada bahan baku pertanian dan peternakan menyebabkan harga produk olahan tidak stabil.</p>	<p>1. Ketergantungan pada eksploitasi sumber daya alam tanpa jaminan keberlanjutan</p> <p>2. Limbah industri kecil belum dikelola secara memadai (air limbah, residu)</p> <p>3. Belum tersedia pelatihan berbasis green industry dan industri ramah lingkungan</p>	<p>1. Perubahan iklim dan dorongan menuju industri hijau</p> <p>2. Tren industri 4.0 dan digitalisasi manufaktur</p> <p>3. Persaingan produk industri global</p>	<p>1. Kebijakan hilirisasi industri berbasis potensi lokal</p> <p>2. Program substitusi impor dan penguatan industri dalam negeri</p> <p>3. Revitalisasi kawasan industri dan IKM terpadu</p>	<p>1. Masih dominannya industri mikro dan kecil</p> <p>2. Belum optimalnya pemanfaatan sentra industri di daerah</p> <p>3. Belum tersedianya data IKM yang berizin maupun belum berizin.</p>	<p>1. Ponorogo memiliki potensi bahan baku melimpah, namun mayoritas belum diolah secara optimal menjadi produk industri bernilai tinggi.</p> <p>2. Belum optimalnya kawasan peruntukan industri dan minimnya fasilitas penunjang (listrik industri, IPAL, jalan produksi).</p> <p>3. Banyak pelaku industri kesulitan mendapatkan modal, peralatan modern, serta akses pasar digital dan ekspor</p>



## BAB III

### TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

#### 3.1 Tujuan

Untuk mewujudkan pelaksanaan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo, Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro perlu menetapkan tujuan pembangunan perdagangan, koperasi dan usaha mikro, serta perindustrian yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan pembangunan perdagangan, koperasi dan usaha mikro serta perindustrian ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan perdagangan, koperasi dan usaha mikro serta perindustrian secara umum. Disamping itu, juga dalam rangka memberikan kepastian operasional dan keterkaitan terhadap peran misi serta program yang ditetapkan.

Penetapan tujuan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo mengacu pada Instruksi Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan pembangunan urusan perdagangan, koperasi dan usaha mikro, serta perindustrian di Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo tahun 2025-2029 adalah meningkatkan daya saing ekonomi daerah melalui penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta pemberdayaan koperasi.

#### 3.2 Sasaran

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo menetapkan sasaran – sasaran yang akan dicapai sebagai berikut:

##### 1. **Urusan Koperasi dan Usaha Mikro**

- Meningkatkan daya saing daerah melalui investasi berkelanjutan



Dalam rangka meningkatkan daya saing daerah melalui investasi berkelanjutan diperlukan upaya terus-menerus untuk melakukan peningkatan rasio kewirausahaan daerah dan peningkatan proporsi jumlah usaha kecil dan menengah Non Pertanian Level Kabupaten.

Selain koperasi, keberadaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang begitu banyak dan tersebar di seluruh Kabupaten Ponorogo merupakan sebuah potensi yang harus dilakukan pembinaan agar supaya terus mengalami perkembangan baik secara kualitas dan kuantitas.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator :

- 1) Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi;
- 2) Prosentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi;
- 3) Prosentase Koperasi Aktif;
- 4) Prosentase Koperasi yang diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan;
- 5) Prosentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas;
- 6) Prosentase Usaha Kecil yang bertransformasi dari Informal ke Formal
- 7) Pertumbuhan Wirausaha
- 8) Proporsi UKM Menjalinkan Kemitraan dan Ekspor
- 9) Prosentase Koperasi yang memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam

## **2. Urusan Perdagangan**

- Terwujudnya pertumbuhan ekonomi berkualitas

Dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas diperlukan upaya terus-menerus untuk melakukan peningkatan terhadap kontribusi sektor perdagangan besar, dan eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB (ADHB).



Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator :

- 1) Prosentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi;
- 2) Prosentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya;
- 3) Prosentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
- 4) Jumlah Komoditas yang di Ekspor;
- 5) Prosentase Penanganan Pengaduan Konsumen;
- 6) Prosentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/Dilaksanakan.

### **3. Urusan Perindustrian**

- Terwujudnya pertumbuhan ekonomi berkualitas

Banyaknya Industri Kecil Menengah di Kabupaten Ponorogo yang merupakan potensi daerah untuk menghasilkan produk-produk unggulan daerah sangat perlu diberikan pembinaan untuk mengasah kemampuan dan ketrampilan. Selain mengembangkan yang telah ada, diharapkan nantinya juga akan muncul wirausaha baru. Dengan munculnya Industri Kecil Menengah yang baru otomatis akan menciptakan lapangan pekerjaan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Ponorogo.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator :

- 1) Prosentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri;
- 2) Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini

**Tabel 3.1 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN  
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD  
PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
<b>2.17.3.30.3.31.01.0000 - DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO</b>											
- Penguatan UMKM, Koperasi, BUMD dan BUMDes Melalui Riset Inovasi  - Terwujudnya pertumbuhan ekonomi berkualitas	Meningkatkan daya saing ekonomi daerah melalui penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta pemberdayaan koperasi		Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	2,44	2,59	2,72	2,85	2,98	3,12	3,25	
			Kontribusi PDRB Industri Pengolahan ((%))	9,62	9,63	9,65	9,66	9,67	9,69	9,7	
		Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Produktivitas Usaha Mikro	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian Pada Level Kabupaten (%)	-	92,18	92,38	92,58	92,78	92,98	93,18	
			Peningkatan Volume Usaha Koperasi (%)	12	4,09	4,15	4,22	4,28	4,34	4,41	
		Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan	Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB (ADHB) (%)	18,19	18,43	18,63	18,82	19,02	19,21	19,41	
Meningkatnya Pertumbuhan IKM	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah yang Aktif (%)	-	0,3	0,55	0,8	1,04	1,29	1,54			

Visi-Misi Kepala Daerah Kabupaten Ponorogo Periode 2025–2029 adalah sebagai berikut :

**"Mewujudkan Kabupaten Ponorogo HEBAT (Harmonis, Elok, Bergas, Amanah dan Takwa)"**

Misi :

1. Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan, Pendidikan dan Perlindungan Sosial.
2. Transformasi Ekonomi Dalam Rangka Penguatan UMKM, Koperasi, BUMD dan BUMDes Melalui Riset Inovasi Implementasi Ekonomi Hijau, Transformasi Digital, Integrasi Ekonomi Wilayah serta Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja.
3. Penguatan Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi.
4. Transformasi Tata Kelola untuk Mewujudkan Birokrasi yang Transparan, Akuntabel, Inklusif, Bermanfaat, serta Berdampak Revolusi Teknologi Informasi.
5. Pemenuhan dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur dengan Pendekatan Konektivitas untuk Mendukung Kawasan Strategis dan Pemerataan Pembangunan.

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo dengan dokumen RPJMD Kabupaten Ponorogo tahun 2025-2029, maka dalam penyusunannya harus menjadikan dokumen tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo yang telah dicantumkan dalam target kinerja RPJMD.

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Ponorogo, Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro memiliki kontribusi untuk mewujudkan

sebagian Misi dalam RPJMD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki sebagai berikut :

**Misi 2, “Transformasi Ekonomi Dalam Rangka Penguatan UMKM, Koperasi, BUMD dan BUMDes Melalui Riset Inovasi Implementasi Ekonomi Hijau, Transformasi Digital, Integrasi Ekonomi Wilayah serta Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja”** bertujuan untuk :

1. Meningkatkan daya saing ekonomi daerah melalui penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta pemberdayaan koperasi.

Adapun sasaran yang ingin dicapai dari pembangunan urusan perdagangan, koperasi dan usaha mikro, serta perindustrian sesuai RPJMD adalah Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas.

### 3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029

Strategi merupakan usaha-usaha untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Adapun strategi pencapaian tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo diarahkan pada peningkatan pertumbuhan koperasi dan usaha mikro, peningkatan pertumbuhan industri dan perdagangan.

Tabel 3.2 Tahapan Renstra Perangkat Daerah

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penataan data dan legalitas pelaku usaha mikro, koperasi, IKM, serta penertiban	Meningkatkan kapasitas SDM, kualitas produk, dan pengelolaan usaha koperasi,	Akselerasi digitalisasi usaha dan perluasan pasar koperasi, UMKM dan industri lokal melalui jaringan e-	Transformasi ekonomi rakyat dari sektor mikro menuju industri rumah tangga	Mendorong ekspor dan perdagangan internasional berbasis produk lokal unggulan serta



kelembagaan dan aset usaha.	UMKM, serta IKM.	commerce dan kemitraan.	dan agroindustri.	koperasi ekspor.
-----------------------------	------------------	-------------------------	-------------------	------------------

1. Tahap I, fokus pembangunan meliputi:
  - a. Pendataan dan verifikasi koperasi, UMKM, dan industri kecil.
  - b. Fasilitasi NIB, IUMK, PIRT, Halal, dan SNI.
  - c. Penataan dan penertiban pasar tradisional.
  - d. Penguatan regulasi dan perlindungan usaha mikro.
2. Tahap II, fokus pembangunan meliputi:
  - a. Pelatihan manajemen usaha, keuangan, pemasaran digital.
  - b. Inkubasi bisnis koperasi dan UMKM.
  - c. Peningkatan kualitas kemasan dan branding produk lokal.
  - d. Pendampingan koperasi modern (koperasi sektor riil dan produsen).
3. Tahap III, fokus pembangunan meliputi:
  - a. Pendaftaran UMKM dan koperasi ke marketplace nasional (Tokopedia, Shopee).
  - b. Penguatan koperasi digital (koperasi online).
  - c. Promosi dan expo produk unggulan daerah.
  - d. Pembukaan jalur distribusi ke ritel modern dan antarwilayah.
4. Tahap IV, fokus pembangunan meliputi:
  - a. Pengembangan kawasan industri kecil (batik, makanan olahan, herbal).
  - b. Pengolahan hasil pertanian dan peternakan lokal.
  - c. Kemitraan koperasi dengan industri besar atau eksportir.
  - d. Insentif alat produksi tepat guna bagi UMKM dan IKM.
5. Tahap V, fokus pembangunan meliputi:
  - a. Sertifikasi ekspor (HACCP, Halal Internasional, SNI Ekspor).
  - b. Pendaftaran merek dagang ke luar negeri.
  - c. Kolaborasi dengan Atase Perdagangan dan diaspora.
  - d. Dukungan logistik ekspor UMKM (fasilitasi kontainer, gudang transit).

### **3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029**

Kebijakan adalah arah/tindakan yang ditetapkan oleh Instansi Pemerintah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan





	manufaktur	keunggulan wilayah industri pengolahan tembakau, industri makanan dan minuman, industri consumer goods & general manufactures, industri kayu dan barang dari kayu, industri alat angkutan dan kendaraan (kereta api)	mikro dan potensi unggulan daerah	
	Penguatan infrastruktur pendukung ekonomi	Pengembangan ekonomi syariah antara lain pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis pesantren, industri halal, pariwisata halal dan lain lain.	Pengembangan ekonomi syariah melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis pesantren, penguatan industri halal, pariwisata halal, dan penguatan kelembagaan pendukung.	
		Memperkuat infrastruktur ekonomi yang mendukung pertumbuhan sektor-sektor strategis pertanian, industri, perdagangan dan pariwisata, serta meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pasar dan teknologi.	Memperkuat infrastruktur ekonomi untuk mendukung pertumbuhan sektor strategis seperti pertanian, industri, perdagangan, dan pariwisata, serta meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pasar dan teknologi.	
	Meningkatkan akses pasar domestik dan global	Pengembangan/peningkatan government- induced activities dalam rangka peningkatan pergerakan orang dan barang.	Peningkatan dan pengembangan potensi unggulan daerah berbasis produk UMKM/IKM melalui optimalisasi tata kelola perdagangan	
		Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional maupun kerjasama internasional lainnya	Peningkatan integrasi pelaku usaha daerah dalam rantai nilai global melalui penguatan skema kerja sama regional dan internasional.	



## BAB IV

### PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

#### 4.1 Uraian Program

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran. Program pembangunan yang telah ditetapkan oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai 5 (lima) tahun ke depan adalah :

- A. Untuk mencapai sasaran **Meningkatnya kuantitas dan kualitas koperasi dan usaha mikro** dan tujuan **Meningkatnya Kontribusi UMKM dalam Perekonomian**, ditempuh melalui program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. PROGRAM : PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM

Kegiatan : Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

*Sub Kegiatan* : Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota.

2. PROGRAM : PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI

Kegiatan : Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota

*Sub Kegiatan* : Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota.

3. PROGRAM : PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)

Kegiatan : Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan

*Sub Kegiatan* : Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro

4. PROGRAM : PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN

Kegiatan : Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

*Sub Kegiatan* : Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi

5. PROGRAM : PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI

Kegiatan : Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

*Sub Kegiatan* : Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

B. Untuk mencapai sasaran **Meningkatnya produktivitas usaha perdagangan** dan tujuan **Meningkatnya Nilai Tambah Perdagangan**, ditempuh melalui program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. PROGRAM : PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan memiliki 3 (tiga) kegiatan yaitu :

Kegiatan 1 : Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan

*Sub Kegiatan* : Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan

Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Kegiatan 2 : Penerbitan Tanda Daftar Gudang

*Sub Kegiatan* : Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang

Kegiatan 3 : Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat

*Sub Kegiatan* : Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C

2. Program : Pengembangan Ekspor

Kegiatan : Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

*Sub Kegiatan* : Pameran Dagang Nasional

3. PROGRAM : PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI

Kegiatan : Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

*Sub Kegiatan* : Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota

4. PROGRAM : PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN

Program Peningkatan Saranan Distribusi Perdagangan memiliki 2 (dua) kegiatan yaitu :

Kegiatan 1 : Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

*Sub Kegiatan* : Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

Kegiatan 2 : Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya.

*Sub Kegiatan* : Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan



5. PROGRAM : STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING

Kegiatan : Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota

*Sub Kegiatan :*

- a. Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
- b. Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota

6. PROGRAM : STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

Kegiatan : Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan

*Sub Kegiatan :* Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang

C. Untuk mencapai sasaran **Meningkatnya nilai tambah produk IKM** dan tujuan **Meningkatnya Daya Saing Industri**, ditempuh melalui program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. PROGRAM : PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL

Kegiatan : Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas.

2. PROGRAM : PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

Kegiatan : Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota

*Sub Kegiatan :*

- a. Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota

- b. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri
- c. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
- d. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
- e. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

D. Disamping itu ada PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA dimana program ini bertujuan untuk mendukung kelancaran pengelolaan rutin rumah tangga dinas. Kegiatan rutin intern Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro yang berhubungan langsung dengan aktifitas serta peningkatan mutu kualitas aparatur pemerintahan di lingkungan Dinas. Mencakup penyediaan sarana dan prasarana penunjang perkantoran. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Terbagi menjadi 5 (*Lima*) kegiatan dan 18 (*Delapan Belas*) sub kegiatan yaitu :

Kegiatan 1 : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

*Sub Kegiatan :*

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

Kegiatan 2 : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

*Sub Kegiatan :* Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Kegiatan 3 : Administrasi Umum Perangkat Daerah

*Sub Kegiatan :*

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor



- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan 3 : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

*Sub Kegiatan* : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Kegiatan 4 : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

*Sub Kegiatan* :

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan 5 : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

*Sub Kegiatan* :

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Program Perangkat Daerah dijabarkan pada tabel 4.1.

**Tabel 4.1 Program Perangkat Daerah  
Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro  
Kabupaten Ponorogo**

**TABEL 4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH  
PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					12.076.899.187,42		12.554.531.435,39		13.311.024.721,27		14.084.032.939,31		14.757.506.181,39	
2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					11.052.899.187,42		11.080.531.435,39		11.357.544.721,27		11.641.483.339,31		11.816.105.589,39	
Tercapainya kebutuhan jasa penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintah daerah	Persentase cakupan pelayanan administrasi Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang sesuai SOP (%) (%)	100	100	100	11.052.899.187,42	100	11.080.531.435,39	100	11.357.544.721,27	100	11.641.483.339,31	100	11.816.105.589,39	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.02 - PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM					50.000.000,00		50.000.000,00		51.000.000,00		52.020.000,00		53.060.400,00	
Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam	Jumlah Koperasi yang memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam (Angka)	65	100	150	50.000.000,00	200	50.000.000,00	250	51.000.000,00	275	52.020.000,00	300	53.060.400,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					50.000.000,00		50.000.000,00		51.000.000,00		52.020.000,00		53.060.400,00	
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Persentase)	40,29	55	82	50.000.000,00	83	50.000.000,00	84	51.000.000,00	85	52.020.000,00	86	53.060.400,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI					50.000.000,00		50.000.000,00		51.000.000,00		52.020.000,00		53.060.400,00	
Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif (Persentase)	3,3	4	4,5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5,5	51.000.000,00	6	52.020.000,00	6	53.060.400,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					327.000.000,00		427.000.000,00		535.540.000,00		646.250.800,00		759.175.816,00	
Meningkatnya Kualitas SDM Perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan (Persentase)	0	3	11	327.000.000,00	20	427.000.000,00	23	535.540.000,00	25	646.250.800,00	25	759.175.816,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					50.000.000,00		50.000.000,00		51.000.000,00		52.020.000,00		53.060.400,00	
Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (Persentase)	40,29	55	81	50.000.000,00	83	50.000.000,00	85	51.000.000,00	87	52.020.000,00	87	53.060.400,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					397.000.000,00		747.000.000,00		1.111.940.000,00		1.484.178.800,00		1.863.862.376,00	
Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (Persentase)	-	2,72	2,85	397.000.000,00	2,98	747.000.000,00	3,12	1.111.940.000,00	3,25	1.484.178.800,00	3,5	1.863.862.376,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					100.000.000,00		100.000.000,00		102.000.000,00		104.040.000,00		106.120.800,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM menjalin Kemitraan (%)	-	7	9	100.000.000,00	11	100.000.000,00	13	102.000.000,00	15	104.040.000,00	15	106.120.800,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					3.019.441.500,00		3.419.441.500,00		3.828.790.330,00		4.238.326.136,00		4.648.052.658,64	
3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					17.000.000,00		17.000.000,00		17.340.000,00		17.686.800,00		18.040.536,00	
Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (Persentase)	100	100	100	17.000.000,00	100	17.000.000,00	100	17.340.000,00	100	17.686.800,00	100	18.040.536,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					2.552.000.000,00		2.952.000.000,00		3.352.000.000,00		3.752.000.000,00		4.152.000.000,00	
Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase)	100	100	100	2.552.000.000,00	100	2.952.000.000,00	100	3.352.000.000,00	100	3.752.000.000,00	100	4.152.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					258.400.000,00		258.400.000,00		263.568.000,00		268.839.360,00		274.216.147,20	
Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Persentase)	88	90	92	258.400.000,00	94	258.400.000,00	96	263.568.000,00	98	268.839.360,00	100	274.216.147,20	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					50.000.000,00		50.000.000,00		51.000.000,00		52.020.000,00		53.060.400,00	
Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Jumlah Komoditas yang diekspor (Angka)	0	1	2	50.000.000,00	3	50.000.000,00	4	51.000.000,00	5	52.020.000,00	6	53.060.400,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					26.555.000,00		26.555.000,00		27.086.100,00		27.627.822,00		28.180.378,44	
Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase penanganan pengaduan konsumen (%)	100	100	100	26.555.000,00	100	26.555.000,00	100	27.086.100,00	100	27.627.822,00	100	28.180.378,44	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					115.486.500,00		115.486.500,00		117.796.230,00		120.152.154,00		122.555.197,00	
Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan (Persentase)	100	100	100	115.486.500,00	100	115.486.500,00	100	117.796.230,00	100	120.152.154,00	100	122.555.197,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					2.570.438.842,00		2.970.438.842,00		3.429.847.618,84		3.898.444.571,22		4.376.413.462,64	
3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					2.564.438.842,00		2.964.438.842,00		3.423.727.618,84		3.892.202.171,22		4.370.046.214,64	
Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri (Persentase)	8	8	9	2.564.438.842,00	9	2.964.438.842,00	10	3.423.727.618,84	10	3.892.202.171,22	10	4.370.046.214,64	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					6.000.000,00		6.000.000,00		6.120.000,00		6.242.400,00		6.367.248,00	
Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini (Persentase)	35	35	35	6.000.000,00	35	6.000.000,00	35	6.120.000,00	35	6.242.400,00	35	6.367.248,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
TOTAL KESELURUHAN					17666779529.42		18944411777.39		20569662670.11		22220803646.53		23781972302.67	

## 4.2 Uraian Kegiatan

Secara lebih detail rumusan program, kegiatan, indikator kinerja, sasaran dan pendanaan indikatif sebagaimana tersaji dalam tabel-tabel berikut:

**Tabel 4.2 Rumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo**

**TABEL 4.2 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN  
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD  
PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)		
<b>2.17.3.30.3.31.01.0000 - DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO</b>									
- Penguatan UMKM, Koperasi, BUMD dan BUMDes Melalui Riset Inovasi - Terwujudnya pertumbuhan ekonomi berkualitas	Meningkatkan daya saing ekonomi daerah melalui penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta pemberdayaan koperasi				Rasio Kewirausahaan Daerah (%)				
					Kontribusi PDRB Industri Pengolahan ((%))				
		Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Produktivitas Usaha Mikro				Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian Pada Level Kabupaten (%)			
						Peningkatan Volume Usaha Koperasi (%)			
						Tercapainya kebutuhan jasa penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintah daerah	Persentase cakupan pelayanan administrasi Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang sesuai SOP	2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
						Prosentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan program/kegiatan/sub kegiatan dan anggaran perangkat daerah secara partisipatif dan tepat waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.17.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.17.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.17.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.17.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Prosentase penyusunan dokumen keuangan perangkat daerah secara partisipatif dan tepat waktu	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	2.17.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.17.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2.17.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.17.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.17.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	2.17.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.17.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2.17.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Prosentase pelayanan kepegawaian serta penyediaan prasarana perangkat daerah yang memadai	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2.17.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2.17.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Prosentase pelayanan administrasi umum dan kepegawaian serta penyediaan prasarana perangkat daerah yang memadai	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.17.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.17.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.17.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.17.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.17.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Prosentase pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.17.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.17.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.17.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.17.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.17.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.17.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Prosentase pelaksanaan administrasi realisasi anggaran serta pengelolaan pencatatan aset yang akuntable	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	2.17.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.17.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam		Jumlah Koperasi yang memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam (Angka)	2.17.02 - PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	
				Prosentase koperasi yang mendapatkan pemenuhan izin usaha simpan pinjam	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha)	2.17.02.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha)	2.17.02.2.01.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Koperasi		Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Persentase)	2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	
				Prosentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan (Unit Usaha)	2.17.03.2.01 - Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan (Unit Usaha)	2.17.03.2.01.0004 - Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Koperasi		Persentase Koperasi Aktif (Persentase)	2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	
				Prosentase Koperasi yang dinilai kesehatannya	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha)	2.17.04.2.01 - Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha)	2.17.04.2.01.0001 - Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Kualitas SDM Perkoperasian		Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan (Persentase)	2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	
				Prosentase Koperasi yang mengikuti Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (Orang)	2.17.05.2.01 - Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (Orang)	2.17.05.2.01.0001 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	
			Meningkatnya produktivitas koperasi		Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (Persentase)	2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	
				Prosentase Koperasi yang mendapatkan bantuan permodalan	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha (Unit Usaha)	2.17.06.2.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha (Unit Usaha)	2.17.06.2.01.0005 - Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	
			Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri		Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (Persentase)	2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	
				Prosentase data potensi dan pengembangan usaha mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro (Unit Usaha)	2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	
					Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro (Unit Usaha)	2.17.07.2.01.0004 - Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	
			Meningkatnya daya saing UMKM		Proporsi UKM menjalin Kemitraan (%)	2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Prosentase UMKM yang dilakukan pengembangan usaha	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi (Unit Usaha)	2.17.08.2.01 - Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	
					Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi (Unit Usaha)	2.17.08.2.01.0006 - Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	
		Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan			Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB (ADHB) (%)		
			Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha		Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (Persentase)	3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	
				Prosentase pelaku usaha yang mengajukan perijinan	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	3.30.02.2.01 - Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	
					Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	3.30.02.2.01.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	
				Prosentase penerbitan tanda daftar gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang (Dokumen)	3.30.02.2.02 - Penerbitan Tanda Daftar Gudang	
					Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang (Dokumen)	3.30.02.2.02.0001 - Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	
				Prosentase Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	3.30.02.2.05 - Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	3.30.02.2.05.0001 - Fasilitas Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	
			Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi		Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase)	3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	
				Indeks sarana dan prasarana perdagangan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	3.30.03.2.01 - Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	
					Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	3.30.03.2.01.0002 - Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	
			Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting		Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Persentase)	3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	
				Prosentase pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	3.30.04.2.02 - Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan (Laporan)	3.30.04.2.02 - Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan (Laporan)	3.30.04.2.02.0002 - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	3.30.04.2.02.0003 - Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor		Jumlah Komoditas yang diekspor (Angka)	3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Prosentase nilai perdagangan antar wilayah termasuk ekspor	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang (Pelaku Usaha)	3.30.05.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang (Pelaku Usaha)	3.30.05.2.01.0002 - Pameran Dagang Nasional	
			Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk		Persentase penanganan pengaduan konsumen (%)	3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	
				Prosentase pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (Unit)	3.30.06.2.01 - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	
					Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (Unit)	3.30.06.2.01.0001 - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	
			Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri		Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan (Persentase)	3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	
				Prosentase promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota (UMKM)	3.30.07.2.01 - Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	
					Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota (UMKM)	3.30.07.2.01.0005 - Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya Pertumbuhan IKM			Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah yang Aktif (%)		
			Meningkatnya realisasi pembangunan industri		Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri (Persentase)	3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	
				Prosentase Peningkatan Pelaksanaan Tahapan Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri (Dokumen)	3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Dokumen)	3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen)	3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)	3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	3.31.02.2.01.0001 - Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri (Dokumen)	3.31.02.2.01.0002 - Koordinasi Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen)	3.31.02.2.01.0003 - Koordinasi Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Dokumen)	3.31.02.2.01.0004 - Koordinasi Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)	3.31.02.2.01.0005 - Koordinasi Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	
			Meningkatnya pemanfaatan informasi industri		Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini (Persentase)	3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	
				Prosentase Penyampaian Data Industri	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas (Dokumen)	3.31.04.2.01 - Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas (Dokumen)	3.31.04.2.01.0003 - Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	

#### 4.3 Uraian Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif

**TABEL 4.3 Rencana Program / Kegiatan / Sub Kegiatan dan Pendanaan  
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO  
PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO**

**TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN  
PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				12.076.899.187,42		12.554.531.435,39		13.311.024.721,27		14.084.032.939,31		14.757.506.181,39		
2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				11.052.899.187,42		11.080.531.435,39		11.357.544.721,27		11.641.483.339,31		11.816.105.589,39		
Tercapainya kebutuhan jasa penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintah daerah	Persentase cakupan pelayanan administrasi Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang sesuai SOP (%) (%)	100	100	11.052.899.187,42	100	11.080.531.435,39	100	11.357.544.721,27	100	11.641.483.339,31	100	11.816.105.589,39	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
2.17.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				58.605.282,00		58.605.282,00		58.605.282,00		58.605.282,00		58.605.282,00		
Prosentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan program/kegiatan/sub kegiatan dan anggaran perangkat daerah secara partisipatif dan tepat waktu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	18	18	58.605.282,00	18	58.605.282,00	18	58.605.282,00	18	58.605.282,00	18	58.605.282,00		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6	6		6		6		6		6			
2.17.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				29.999.800,00		29.999.800,00		29.999.800,00		29.999.800,00		29.999.800,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6	6	29.999.800,00	6	29.999.800,00	6	29.999.800,00	6	29.999.800,00	6	29.999.800,00		
2.17.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				28.605.482,00		28.605.482,00		28.605.482,00		28.605.482,00		28.605.482,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	18	18	28.605.482,00	18	28.605.482,00	18	28.605.482,00	18	28.605.482,00	18	28.605.482,00		
2.17.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				8.837.771.800,42		8.847.771.800,39		9.016.986.561,27		9.126.986.561,31		9.236.986.561,39		
Prosentase penyusunan dokumen keuangan perangkat daerah secara partisipatif dan tepat waktu	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12	8.837.771.800,42	12	8.847.771.800,39	12	9.016.986.561,27	12	9.126.986.561,31	12	9.236.986.561,39		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	72	72		72		72		72					
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2	2		2		2		2					



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	4		4		4		4		4			
2.17.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				24.924.000,00		24.924.000,00		24.924.000,00		24.924.000,00		24.924.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	24.924.000,00	4	24.924.000,00	4	24.924.000,00	4	24.924.000,00	4	24.924.000,00		
2.17.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				245.000.000,00		255.000.000,00		265.000.000,00		275.000.000,00		285.000.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	245.000.000,00	4	255.000.000,00	4	265.000.000,00	4	275.000.000,00	4	285.000.000,00		
2.17.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				140.000.000,00		140.000.000,00		140.000.000,00		140.000.000,00		140.000.000,00		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	4	140.000.000,00	4	140.000.000,00	4	140.000.000,00	4	140.000.000,00	4	140.000.000,00		
2.17.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				32.000.000,00		32.000.000,00		32.000.000,00		32.000.000,00		32.000.000,00		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12	32.000.000,00	12	32.000.000,00	12	32.000.000,00	12	32.000.000,00	12	32.000.000,00		
2.17.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				80.397.975,00		80.397.975,00		80.397.975,00		80.397.975,00		80.397.975,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	80.397.975,00	12	80.397.975,00	12	80.397.975,00	12	80.397.975,00	12	80.397.975,00		
2.17.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				995.287.960,00		995.287.960,00		995.287.960,00		995.287.960,00		995.287.960,00		
Prosentase pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	6	995.287.960,00	6	995.287.960,00	6	995.287.960,00	6	995.287.960,00	6	995.287.960,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	6		6		6		6					
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	36	36		36		36		36					
2.17.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				953.287.960,00		953.287.960,00		953.287.960,00		953.287.960,00		953.287.960,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	36	36	953.287.960,00	36	953.287.960,00	36	953.287.960,00	36	953.287.960,00	36	953.287.960,00		
2.17.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	6	30.000.000,00	6	30.000.000,00	6	30.000.000,00	6	30.000.000,00	6	30.000.000,00		
2.17.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	6	12.000.000,00	6	12.000.000,00	6	12.000.000,00	6	12.000.000,00	6	12.000.000,00		
2.17.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				88.912.170,00		96.544.418,00		144.342.943,00		308.281.561,00		362.903.811,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Prosentase pelaksanaan administrasi realisasi anggaran serta pengelolaan pencatatan aset yang akuntable	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5	5	88.912.170,00	6	96.544.418,00	6	144.342.943,00	7	308.281.561,00	8	362.903.811,00		
2.17.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				88.912.170,00		96.544.418,00		144.342.943,00		308.281.561,00		362.903.811,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5	5	88.912.170,00	6	96.544.418,00	6	144.342.943,00	7	308.281.561,00	8	362.903.811,00		
2.17.02 - PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM				50.000.000,00		50.000.000,00		51.000.000,00		52.020.000,00		53.060.400,00		
Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam	Jumlah Koperasi yang memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam (Angka)	65	150	50.000.000,00	200	50.000.000,00	250	51.000.000,00	275	52.020.000,00	300	53.060.400,00	2.17.3.30.3.31.01.00 - DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
2.17.02.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				50.000.000,00		50.000.000,00		51.000.000,00		52.020.000,00		53.060.400,00		
Prosentase koperasi yang mendapatkan pemenuhan izin usaha simpan pinjam	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha)	0	130	50.000.000,00	160	50.000.000,00	190	51.000.000,00	220	52.020.000,00	250	53.060.400,00		
2.17.02.2.01.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				50.000.000,00		50.000.000,00		51.000.000,00		52.020.000,00		53.060.400,00		
Terfasilitasinya Pemenuhan Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha)	0	130	50.000.000,00	160	50.000.000,00	190	51.000.000,00	220	52.020.000,00	250	53.060.400,00		
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				50.000.000,00		50.000.000,00		51.000.000,00		52.020.000,00		53.060.400,00		
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Persentase)	40,29	82	50.000.000,00	83	50.000.000,00	84	51.000.000,00	85	52.020.000,00	86	53.060.400,00	2.17.3.30.3.31.01.00 - DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
2.17.03.2.01 - Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota				50.000.000,00		50.000.000,00		51.000.000,00		52.020.000,00		53.060.400,00		
Prosentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan (Unit Usaha)	0	230	50.000.000,00	260	50.000.000,00	290	51.000.000,00	320	52.020.000,00	350	53.060.400,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.17.03.2.01.0004 - Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota				50.000.000,00		50.000.000,00		51.000.000,00		52.020.000,00		53.060.400,00		
Pelaksanaan proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan (Unit Usaha)	0	230	50.000.000,00	260	50.000.000,00	290	51.000.000,00	320	52.020.000,00	350	53.060.400,00		
2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI				50.000.000,00		50.000.000,00		51.000.000,00		52.020.000,00		53.060.400,00		
Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif (Persentase)	3,3	4,5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5,5	51.000.000,00	6	52.020.000,00	6	53.060.400,00	2.17.3.30.3.31.01.00 - DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
2.17.04.2.01 - Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				50.000.000,00		50.000.000,00		51.000.000,00		52.020.000,00		53.060.400,00		
Prosentase Koperasi yang dinilai kesehatannya	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha)	200	220	50.000.000,00	230	50.000.000,00	240	51.000.000,00	250	52.020.000,00	260	53.060.400,00		
2.17.04.2.01.0001 - Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota				50.000.000,00		50.000.000,00		51.000.000,00		52.020.000,00		53.060.400,00		
Terlaksananya Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha)	200	220	50.000.000,00	230	50.000.000,00	240	51.000.000,00	250	52.020.000,00	260	53.060.400,00		
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN				327.000.000,00		427.000.000,00		535.540.000,00		646.250.800,00		759.175.816,00		
Meningkatnya Kualitas SDM Perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan (Persentase)	0	11	327.000.000,00	20	427.000.000,00	23	535.540.000,00	25	646.250.800,00	25	759.175.816,00	2.17.3.30.3.31.01.00 - DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
2.17.05.2.01 - Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				327.000.000,00		427.000.000,00		535.540.000,00		646.250.800,00		759.175.816,00		
Prosentase Koperasi yang mengikuti Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (Orang)	0	260	327.000.000,00	270	427.000.000,00	280	535.540.000,00	290	646.250.800,00	300	759.175.816,00		
2.17.05.2.01.0001 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi				327.000.000,00		427.000.000,00		535.540.000,00		646.250.800,00		759.175.816,00		
Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (Orang)	0	260	327.000.000,00	270	427.000.000,00	280	535.540.000,00	290	646.250.800,00	300	759.175.816,00		
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI				50.000.000,00		50.000.000,00		51.000.000,00		52.020.000,00		53.060.400,00		
Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (Persentase)	40,29	81	50.000.000,00	83	50.000.000,00	85	51.000.000,00	87	52.020.000,00	87	53.060.400,00	2.17.3.30.3.31.01.00 - DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.17.06.2.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota				50.000.000,00		50.000.000,00		51.000.000,00		52.020.000,00		53.060.400,00		
Prosentase Koperasi yang mendapatkan bantuan permodalan	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha (Unit Usaha)	0	15	50.000.000,00	20	50.000.000,00	25	51.000.000,00	30	52.020.000,00	35	53.060.400,00		
2.17.06.2.01.0005 - Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha				50.000.000,00		50.000.000,00		51.000.000,00		52.020.000,00		53.060.400,00		
Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha (Unit Usaha)	0	15	50.000.000,00	20	50.000.000,00	25	51.000.000,00	30	52.020.000,00	35	53.060.400,00		
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				397.000.000,00		747.000.000,00		1.111.940.000,00		1.484.178.800,00		1.863.862.376,00		
Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (Persentase)	-	2,85	397.000.000,00	2,98	747.000.000,00	3,12	1.111.940.000,00	3,25	1.484.178.800,00	3,5	1.863.862.376,00	2.17.3.30.3.31.01.00 - DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan				397.000.000,00		747.000.000,00		1.111.940.000,00		1.484.178.800,00		1.863.862.376,00		
Prosentase data potensi dan pengembangan usaha mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro (Unit Usaha)	0	110	397.000.000,00	120	747.000.000,00	130	1.111.940.000,00	140	1.484.178.800,00	150	1.863.862.376,00		
2.17.07.2.01.0004 - Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro				397.000.000,00		747.000.000,00		1.111.940.000,00		1.484.178.800,00		1.863.862.376,00		
Terfasilitasinya Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro (Unit Usaha)	0	110	397.000.000,00	120	747.000.000,00	130	1.111.940.000,00	140	1.484.178.800,00	150	1.863.862.376,00		
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				100.000.000,00		100.000.000,00		102.000.000,00		104.040.000,00		106.120.800,00		
Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM menjalin Kemitraan (%)	-	9	100.000.000,00	11	100.000.000,00	13	102.000.000,00	15	104.040.000,00	15	106.120.800,00	2.17.3.30.3.31.01.00 - DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
2.17.08.2.01 - Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil				100.000.000,00		100.000.000,00		102.000.000,00		104.040.000,00		106.120.800,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Prosentase UMKM yang dilakukan pengembangan usaha	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi (Unit Usaha)	0	120	100.000.000,00	140	100.000.000,00	160	102.000.000,00	180	104.040.000,00	200	106.120.800,00		
2.17.08.2.01.0006 - Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi				100.000.000,00		100.000.000,00		102.000.000,00		104.040.000,00		106.120.800,00		
Terfasilitasinya Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi (Unit Usaha)	0	120	100.000.000,00	140	100.000.000,00	160	102.000.000,00	180	104.040.000,00	200	106.120.800,00		
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				3.019.441.500,00		3.419.441.500,00		3.828.790.330,00		4.238.326.136,00		4.648.052.658,64		
3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN				17.000.000,00		17.000.000,00		17.340.000,00		17.686.800,00		18.040.536,00		
Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (Persentase)	100	100	17.000.000,00	100	17.000.000,00	100	17.340.000,00	100	17.686.800,00	100	18.040.536,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
3.30.02.2.01 - Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan				11.000.000,00		11.000.000,00		10.000.000,00		10.500.000,00		11.000.000,00		
Prosentase pelaku usaha yang mengajukan perijinan	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	12	12	11.000.000,00	12	11.000.000,00	12	10.000.000,00	12	10.500.000,00	12	11.000.000,00		
3.30.02.2.01.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				11.000.000,00		11.000.000,00		10.000.000,00		10.500.000,00		11.000.000,00		
Tersedianya Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	12	12	11.000.000,00	12	11.000.000,00	12	10.000.000,00	12	10.500.000,00	12	11.000.000,00		
3.30.02.2.02 - Penerbitan Tanda Daftar Gudang				2.000.000,00		2.000.000,00		2.500.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		
Prosentase penerbitan tanda daftar gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang (Dokumen)	12	12	2.000.000,00	12	2.000.000,00	12	2.500.000,00	12	3.000.000,00	12	3.000.000,00		
3.30.02.2.02.0001 - Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang				2.000.000,00		2.000.000,00		2.500.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		
Tersedianya Dokumen Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang (Dokumen)	12	12	2.000.000,00	12	2.000.000,00	12	2.500.000,00	12	3.000.000,00	12	3.000.000,00		
3.30.02.2.05 - Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat				4.000.000,00		4.000.000,00		4.840.000,00		4.186.800,00		4.040.536,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Prosentase Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	12	12	4.000.000,00	12	4.000.000,00	12	4.840.000,00	12	4.186.800,00	12	4.040.536,00		
3.30.02.2.05.0001 - Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C				4.000.000,00		4.000.000,00		4.840.000,00		4.186.800,00		4.040.536,00		
Tersedianya Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	12	12	4.000.000,00	12	4.000.000,00	12	4.840.000,00	12	4.186.800,00	12	4.040.536,00		
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				2.552.000.000,00		2.952.000.000,00		3.352.000.000,00		3.752.000.000,00		4.152.000.000,00		
Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase)	100	100	2.552.000.000,00	100	2.952.000.000,00	100	3.352.000.000,00	100	3.752.000.000,00	100	4.152.000.000,00	2.17.3.30.3.31.01.00 - DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
3.30.03.2.01 - Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				2.552.000.000,00		2.952.000.000,00		3.352.000.000,00		3.752.000.000,00		4.152.000.000,00		
Indeks sarana dan prasarana perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	28	28	2.552.000.000,00	28	2.952.000.000,00	28	3.352.000.000,00	29	3.752.000.000,00	29	4.152.000.000,00		
3.30.03.2.01.0002 - Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				2.552.000.000,00		2.952.000.000,00		3.352.000.000,00		3.752.000.000,00		4.152.000.000,00		
Tersedianya Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	28	28	2.552.000.000,00	28	2.952.000.000,00	28	3.352.000.000,00	29	3.752.000.000,00	29	4.152.000.000,00		
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				258.400.000,00		258.400.000,00		263.568.000,00		268.839.360,00		274.216.147,20		
Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Persentase)	88	92	258.400.000,00	94	258.400.000,00	96	263.568.000,00	98	268.839.360,00	100	274.216.147,20	2.17.3.30.3.31.01.00 - DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
3.30.04.2.02 - Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota				258.400.000,00		258.400.000,00		263.568.000,00		268.839.360,00		274.216.147,20		
Prosentase pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	12	12	258.400.000,00	12	258.400.000,00	12	263.568.000,00	12	268.839.360,00	12	274.216.147,20		
	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan (Laporan)	12	12		12		12							

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.30.04.2.02.0002 - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan				228.400.000,00		228.400.000,00		223.568.000,00		223.839.360,00		224.216.147,20		
Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan (Laporan)	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan (Laporan)	12	12	228.400.000,00	12	228.400.000,00	12	223.568.000,00	12	223.839.360,00	12	224.216.147,20		
3.30.04.2.02.0003 - Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				30.000.000,00		30.000.000,00		40.000.000,00		45.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	12	12	30.000.000,00	12	30.000.000,00	12	40.000.000,00	12	45.000.000,00	12	50.000.000,00		
3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR				50.000.000,00		50.000.000,00		51.000.000,00		52.020.000,00		53.060.400,00		
Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Jumlah Komoditas yang diekspor (Angka)	0	2	50.000.000,00	3	50.000.000,00	4	51.000.000,00	5	52.020.000,00	6	53.060.400,00	2.17.3.30.3.31.01.00 - DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
3.30.05.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				50.000.000,00		50.000.000,00		51.000.000,00		52.020.000,00		53.060.400,00		
Prosentase nilai perdagangan antar wilayah termasuk ekspor	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang (Pelaku Usaha)	0	3	50.000.000,00	4	50.000.000,00	5	51.000.000,00	6	52.020.000,00	7	53.060.400,00		
3.30.05.2.01.0002 - Pameran Dagang Nasional				50.000.000,00		50.000.000,00		51.000.000,00		52.020.000,00		53.060.400,00		
Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang (Pelaku Usaha)	0	3	50.000.000,00	4	50.000.000,00	5	51.000.000,00	6	52.020.000,00	7	53.060.400,00		
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				26.555.000,00		26.555.000,00		27.086.100,00		27.627.822,00		28.180.378,44		
Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase penanganan pengaduan konsumen (%)	100	100	26.555.000,00	100	26.555.000,00	100	27.086.100,00	100	27.627.822,00	100	28.180.378,44	2.17.3.30.3.31.01.00 - DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
3.30.06.2.01 - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan				26.555.000,00		26.555.000,00		27.086.100,00		27.627.822,00		28.180.378,44		
Prosentase pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (Unit)	10.000	10.000	26.555.000,00	10.000	26.555.000,00	10.000	27.086.100,00	10.000	27.627.822,00	10.000	28.180.378,44		
3.30.06.2.01.0001 - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang				26.555.000,00		26.555.000,00		27.086.100,00		27.627.822,00		28.180.378,44		
Meningkatnya Kesesuaian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Terhadap Ketentuan yang Berlaku	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (Unit)	10.000	10.000	26.555.000,00	10.000	26.555.000,00	10.000	27.086.100,00	10.000	27.627.822,00	10.000	28.180.378,44		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI				115.486.500,00		115.486.500,00		117.796.230,00		120.152.154,00		122.555.197,00		
Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan (Persentase)	100	100	115.486.500,00	100	115.486.500,00	100	117.796.230,00	100	120.152.154,00	100	122.555.197,00	2.17.3.30.3.31.01.00 - DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
3.30.07.2.01 - Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri				115.486.500,00		115.486.500,00		117.796.230,00		120.152.154,00		122.555.197,00		
Prosentase promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota (UMKM)	0	25	115.486.500,00	30	115.486.500,00	35	117.796.230,00	40	120.152.154,00	45	122.555.197,00		
3.30.07.2.01.0005 - Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				115.486.500,00		115.486.500,00		117.796.230,00		120.152.154,00		122.555.197,00		
Terlaksananya Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota (UMKM)	0	25	115.486.500,00	30	115.486.500,00	35	117.796.230,00	40	120.152.154,00	45	122.555.197,00		
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				2.570.438.842,00		2.970.438.842,00		3.429.847.618,84		3.898.444.571,22		4.376.413.462,64		
3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				2.564.438.842,00		2.964.438.842,00		3.423.727.618,84		3.892.202.171,22		4.370.046.214,64		
Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri (Persentase)	8	9	2.564.438.842,00	9	2.964.438.842,00	10	3.423.727.618,84	10	3.892.202.171,22	10	4.370.046.214,64	2.17.3.30.3.31.01.00 - DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota				2.564.438.842,00		2.964.438.842,00		3.423.727.618,84		3.892.202.171,22		4.370.046.214,64		
Prosentase Peningkatan Pelaksanaan Tahapan Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	2	2	2.564.438.842,00	2	2.964.438.842,00	2	3.423.727.618,84	2	3.892.202.171,22	2	4.370.046.214,64		
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
3.31.02.2.01.0001 - Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota				150.000.000,00		170.000.000,00		190.000.000,00		210.000.000,00		230.000.000,00		
Tersusunnya Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	2	2	150.000.000,00	2	170.000.000,00	2	190.000.000,00	2	210.000.000,00	2	230.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.31.02.2.01.0002 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri				5.000.000,00		6.000.000,00		7.000.000,00		8.000.000,00		9.000.000,00		
Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri (Dokumen)	2	2	5.000.000,00	2	6.000.000,00	2	7.000.000,00	2	8.000.000,00	2	9.000.000,00		
3.31.02.2.01.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				5.000.000,00		6.000.000,00		7.000.000,00		8.000.000,00		9.000.000,00		
Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen)	2	2	5.000.000,00	2	6.000.000,00	2	7.000.000,00	2	8.000.000,00	2	9.000.000,00		
3.31.02.2.01.0004 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				27.999.000,00		29.999.000,00		31.999.000,00		33.999.000,00		35.999.000,00		
Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Dokumen)	2	2	27.999.000,00	2	29.999.000,00	2	31.999.000,00	2	33.999.000,00	2	35.999.000,00		
3.31.02.2.01.0005 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				2.376.439.842,00		2.752.439.842,00		3.187.728.618,84		3.632.203.171,22		4.086.047.214,64		
Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)	2	2	2.376.439.842,00	2	2.752.439.842,00	2	3.187.728.618,84	2	3.632.203.171,22	2	4.086.047.214,64		
3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL				6.000.000,00		6.000.000,00		6.120.000,00		6.242.400,00		6.367.248,00		
Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini (Persentase)	35	35	6.000.000,00	35	6.000.000,00	35	6.120.000,00	35	6.242.400,00	35	6.367.248,00	2.17.3.30.3.31.01.00 - DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
3.31.04.2.01 - Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota				6.000.000,00		6.000.000,00		6.120.000,00		6.242.400,00		6.367.248,00		
Prosentase Penyampaian Data Industri	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas (Dokumen)	0	6	6.000.000,00	6	6.000.000,00	6	6.120.000,00	6	6.242.400,00	6	6.367.248,00		
3.31.04.2.01.0003 - Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas				6.000.000,00		6.000.000,00		6.120.000,00		6.242.400,00		6.367.248,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terpantau dan Dievaluasinya Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas (Dokumen)	0	6	6.000.000,00	6	6.000.000,00	6	6.120.000,00	6	6.242.400,00	6	6.367.248,00		

#### 4.4 Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah dijabarkan pada tabel 4.4 sebagai berikut:

Tabel 4.4 Daftar Sub kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Meningkatnya Kualitas Layanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Gugus Tugas Investasi dan Penguatan Ekonomi
			Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Gugus Tugas Investasi dan Penguatan Ekonomi
2.	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Koperasi	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Gugus Tugas Investasi dan Penguatan Ekonomi
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Gugus Tugas Investasi dan Penguatan Ekonomi
3.	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Koperasi	Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Gugus Tugas Investasi dan Penguatan Ekonomi
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Gugus Tugas Investasi dan Penguatan Ekonomi
4.	Program Pendidikan dan Latihan	Meningkatnya Kualitas SDM	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi	Gugus Tugas

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Perkoperasian	Perkoperasian	Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Investasi dan Penguatan Ekonomi
			Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Gugus Tugas Investasi dan Penguatan Ekonomi
5.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Meningkatnya Produktivitas Koperasi	Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Gugus Tugas Desa Hebat
			Sub Kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Gugus Tugas Desa Hebat
6.	Program Pengembangan UMKM	Meningkatnya Daya Saing UMKM	Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Gugus Tugas Pengentasan Kemiskinan dan IPM
			Sub Kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Gugus Tugas Pengentasan Kemiskinan dan IPM
7.	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Meningkatnya Kemudahan Proses Perizinan dan Pendaftaran Berusaha	Kegiatan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Gugus Tugas Penertiban Perizinan
			Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Gugus Tugas Penertiban Perizinan
			Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Gugus Tugas Penertiban Perizinan
			Sub Kegiatan Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Gugus Tugas Penertiban Perizinan
			Kegiatan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan	Gugus Tugas

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Penertiban Perizinan
			Sub Kegiatan Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Gugus Tugas Penertiban Perizinan
8.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Meningkatnya Kualitas Sarana Perdagangan dan Distribusi Barang yang Efisien, Merata dan Terintegrasi	Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Gugus Tugas PAD IT, Gugus Tugas Pengelolaan Sampah
			Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Gugus Tugas PAD IT, Gugus Tugas Pengelolaan Sampah
			Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Gugus Tugas PAD IT, Gugus Tugas Pengelolaan Sampah
			Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Gugus Tugas PAD IT, Gugus Tugas Pengelolaan Sampah
9.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Meningkatnya Kelancaran Distribusi dan Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Gugus Tugas Ketahanan Pangan dan Kabupaten Organik
			Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Gugus Tugas Ketahanan Pangan dan Kabupaten Organik
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Gugus Tugas Ketahanan Pangan dan Kabupaten

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				Organik
10.	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Meningkatnya Tertib Niaga dan Mutu Produk	Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Gugus Tugas Penertiban Perizinan
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Gugus Tugas Penertiban Perizinan
11.	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Meningkatnya Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Gugus Tugas Investasi dan Penguatan Ekonomi
			Sub kegiatan Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Gugus Tugas Investasi dan Penguatan Ekonomi
12.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Meningkatnya Realisasi Pembangunan Industri	Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Gugus Tugas Percepatan Infrastruktur, Pariwisata dan Pembangunan Monumen Reog
			Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Gugus Tugas Percepatan Infrastruktur, Pariwisata dan Pembangunan Monumen Reog
			Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Gugus Tugas Percepatan Infrastruktur, Pariwisata dan Pembangunan Monumen Reog
			Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Gugus Tugas Percepatan Infrastruktur, Pariwisata dan Pembangunan Monumen Reog
			Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Gugus Tugas Percepatan Infrastruktur, Pariwisata dan Pembangunan

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
13.	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Industri	Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Monumen Reog Gugus Tugas Percepatan Infrastruktur, Pariwisata dan Pembangunan Monumen Reog
			Sub kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Gugus Tugas Percepatan Infrastruktur, Pariwisata dan Pembangunan Monumen Reog

#### 4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui indikator Kinerja Utama (IKU)

Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dijabarkan pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagkum Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	2.17.3.30.3.31.01.0000 - DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO									
2.	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	2,44	2,59	2,72	2,85	2,98	3,12	3,25	
3.	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	(%)	9,62	9,63	9,65	9,66	9,67	9,69	9,7	
4.	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian Pada Level Kabupaten	%	-	92,18	92,38	92,58	92,78	92,98	93,18	
5.	Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB	%	18,19	18,43	18,63	18,82	19,02	19,21	19,41	
6.	Peningkatan Volume Usaha Koperasi	%	12	4,09	4,15	4,22	4,28	4,34	4,41	
7.	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah yang Aktif	%	37	0,3	0,55	0,8	1,04	1,29	1,54	

#### 4.6 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) dijabarkan pada Tabel 4.6

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci Dinas Perdagkum Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH										
2.	Rasio Kewirausahaan Daerah	positif	%	2,44	2,59	2,72	2,85	2,98	3,12	3,25	
3.	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian Pada Level Kabupaten	positif	%	-	92,18	92,38	92,58	92,78	92,98	93,18	
4.	Peningkatan Volume Usaha Koperasi	positif	%	12	4,09	4,15	4,22	4,28	4,34	4,41	
5.	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN										
6.	Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB (ADHB)	positif	%	18,19	18,43	18,63	18,82	19,02	19,21	19,41	
7.	3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN										
8.	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah yang Aktif	positif	%	37	0,3	0,55	0,8	1,04	1,29	1,54	

#### 4.7 Definisi Operasional Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Definisi Operasional Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2026 terdiri dari:

Tabel 4.7 Definisi Operasional Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perdagkum Tahun 2025-2029

<b>Bidang Koperasi dan Usaha Mikro</b>			
<b>No</b>	<b>Nama Indikator</b>	<b>Definisi</b>	<b>Rumus Perhitungan</b>
1.	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada level Kabupaten	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada level Kabupaten merupakan perbandingan jumlah unit usaha kecil dan menengah non pertanian terhadap seluruh unit usaha pada tahun yang sama di wilayah satu kabupaten	<i>Proporsi UKM Non Pertanian</i> = $\frac{\text{Jumlah Unit UKM non Pertanian}}{\text{Total Jumlah Unit Usaha}} \times 100\%$
2.	Peningkatan volume usaha koperasi	Peningkatan volume usaha koperasi merupakan perbandingan kenaikan/penurunan jumlah total volume usaha koperasi pada tahun berjalan dengan jumlah total volume usaha koperasi tahun sebelumnya	<i>Kenaikan Vol. Usaha</i> = $\frac{\text{Vol usaha } t0 - \text{Vol usaha } t - 1}{\text{Vol usaha } t - 1} \times 100\%$
3.	Rasio Kewirausahaan Daerah	Rasio kewirausahaan adalah proporsi jumlah pelaku wirausaha terhadap total jumlah penduduk dalam satu daerah	<i>Rasio kewirausahaan</i> = $\frac{\text{Jumlah Pelaku Wirausaha}}{\text{Jumlah Penduduk satu daerah}} \times 100\%$
<b>Bidang Perdagangan</b>			
<b>No</b>	<b>Nama Indikator</b>	<b>Definisi</b>	<b>Rumus Perhitungan</b>
4.	Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil	Besarnya peranan nilai tambah bruto (NTB) dari sektor perdagangan besar dan eceran serta jasa reparasi kendaraan dalam pembentukan total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Ponorogo	<i>Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (ADHB)</i> = $\frac{\text{PDRB Sektor Perdagangan (ADHB)}}{\text{Total PDRB (ADHB)}} \times 100\%$



	dan Sepeda Motor terhadap PDRB (ADHB)	pada periode tertentu dengan harga berlaku (ADHB).	
<b>Bidang Perindustrian</b>			
No	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan
5.	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah yang Aktif	Persentase jumlah unit usaha industri kecil dan menengah yang masih menjalankan kegiatan produksi/usaha secara berkelanjutan pada tahun tertentu dibandingkan dengan total jumlah IKM yang terdaftar di Kabupaten Ponorogo.	$\text{Proporsi Jumlah IKM Aktif} = \frac{\text{Jumlah IKM Aktif}}{\text{Jumlah IKM Terdaftar}} \times 100\%$
6.	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang bersumber dari sektor Industri Pengolahan yang mencerminkan proporsi nilai tambah sektor industry pengolahan terhadap PDRB	$\text{Kontribusi PDRB Industri Pengolahan} = \frac{\text{Nilai Tambah Sektor Industri Pengolahan}}{\text{Nilai PDRB Provinsi}} \times 100\%$

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Penyusunan Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo Tahun 2025-2029 berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo No 02 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2025-2029 yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, serta Kebijakan, yang selanjutnya dijabarkan dalam bentuk Program, Kegiatan beserta Pagu Anggaran Indikatif. Dokumen ini disusun sebagai acuan dasar bagi penyusunan serta pelaksanaan program dan kegiatan untuk urusan koperasi dan usaha mikro, perdagangan, dan perindustrian sebagaimana kewenangan Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo selama 5 (lima) tahun mendatang. Selanjutnya RENSTRA ini juga dijadikan dasar dalam penilaian kinerja yang telah ditetapkan dan kemudian akan dilakukan evaluasi secara berkala sebagaimana ketentuan atau aturan yang berlaku.

Dokumen Rencana Strategis ini menurut sifatnya merupakan prediksi terhadap masa depan yang tentunya masih terdapat masa depan yang tentunya masih terdapat kekurangan dan keterbatasan sehingga bilamana terjadi hal-hal yang berpengaruh langsung maupun tidak langsung dimungkinkan adanya peninjauan kembali disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang.

Namun demikian harus disadari bersama, bahwa seluruh cita-cita yang diinginkan dan telah tertuang dalam dokumen RENSTRA ini, hanya dapat diwujudkan melalui sinergi dan kerjasama yang baik antar elemen masyarakat di Kabupaten Ponorogo, baik Eksekutif, Legislatif, Lembaga Swadaya Masyarakat, maupun Masyarakat, sesuai kapasitas, tugas pokok dan fungsi serta kewenangan masing-masing. Tentu bukan sesuatu yang mustahil jika Kabupaten Ponorogo mampu memberikan kontribusi dalam rangka tercapainya Pembangunan Nasional melalui pengembangan potensi



sumberdaya lokal serta manajemen penyelesaian atas permasalahan yang ada dilapangan yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat.

## 5.2 Saran

Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo mempunyai peranan sangat penting dalam melaksanakan tugas pemerintahan khususnya urusan urusan koperasi dan usaha mikro, perdagangan, pengelolaan pasar, dan perindustrian. Oleh karena itu harus mampu berperan sebagai koordinator dan dapat memfasilitasi terhadap Dinas/Instansi sebagai sumber aspirasi disetiap tingkatan Kabupaten/Kecamatan/Kelurahan dan Desa yang handal dan profesional.

Rencana Strategis (RENSTRA) ini harus dijalankan secara konsisten dan konsekuen dengan tetap mempertimbangkan situasi dan kondisi yang berkembang serta harus terus menerus didukung, demi kelancaran pencapaian tujuan pelayanan prima kepada masyarakat. Apabila dikemudian hari diperlukan perubahan guna penyempurnaan RENSTRA Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo Tahun 2025-2029, maka akan dilakukan reviu sebagaimana mestinya atas dokumen dimaksud.

Ponorogo, 19 September 2025

Kepala Dinas  
Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro  
Kabupaten Ponorogo



**RINGGA DWI HERI IRAWAN, S.STP., M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197512091996031001